

**PENERAPAN PRINSIP
BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
TERHADAP NASABAH
BANK SYARIAH**

TESIS



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
RASTONO, SH
NIM : B.4A.099.134

Pembimbing :
Prof. Abdullah Kelib, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dalam Memenuhi
Syarat-syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Magister (S2) Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro**

Oleh :

RASTONO, SH

NIM : B.4A.099.134

Penulisan Tesis Dengan Judul diatas telah disetujui untuk disidangkan.

Pembimbing :

PROF. ABDULLAH KELIB, SH

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Peneliti,

PROF. ABDULLAH KELIB, SH

RASTONO, SH

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

PROF. DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH. MH

NIP. 130 531 702

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"..., Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... " (91-Baqarah : 185)

".....Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur" (Al-Maidah : 6)

Serendah-rendahnya Ilmu Pengetahuan
adalah yang terhenti pada lidah
dan setinggi-tingginya Ilmu Pengetahuan
adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan
(RASTONO)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Istriku tercinta Sari Rahmawati
- ❖ Anak-anakku, Eca, Dita, dan
Adi. S
- ❖ Kedua Orang tuaku
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Sistem Hukum Perbankan atas dasar syariah prinsip (Hukum Islam) dimana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 tahun 1999 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan kehati-hatian, dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah Bank Syariah dan apa hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah?

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dilakukan dengan penelitian inventarisasi Hukum Positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah menemukan bahwa prinsip hasil terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Penerapan pembiayaan berdasarkan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hambatan yuridis dan penyelesaian dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah, masalah sumber daya manusia insani dan standar fatwa.

Skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu asimetrie information, moral hazard dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini dengan penerapan incentive-compatible constraint.

Kata kunci : Prinsip, bagi hasil, pembiayaan Bank Syariah.

ABSTRACT

Banking law system on the basis of syariah principles (Islamic Law) with profit sharing system, enables to apply in Indonesia after the prevailing of the Act number 7, 1992 about Banking (article 6 letter in). This act was followed by the implementation stipulation in The Government Regulation number 72, 1992. It is hoped that this act can give contribution, creating carefulness, and harmony for banks and customers and can perform effectively and efficiently.

The problems discussed in this thesis are ; What are the principles of profit sharing in financing, How is ' the application of financing on the basis of profit sharing principles on the customers of Bank Syariah Muamalat Semarang, and What are the juridical obstructions and the settlements faced by Bank Syariah Muamalat Semarang in applying profit sharing principles in financing customers.

The approach method done in the research is Socio Legal research. Socio Legal research is used as social medication therefore law is applicated on its surface. In socio legal research, law is always meant to be social problem. The research focus on individual behavior or community related to the law.

The approach method conducted in this research was judicial normative by the research on positive law collection, the research on legal principles, law systematic, vertical and horizontal synchronizations, the history of law, and legal comparison.

PLS Financing selume also has the weakness in it's performing esppecially in connection with the nigh risk including financing risk, market risk, and operasional risk. The problem of practicing this financing esppecially in the connection information with agency problem are asimetric information moral hazard, and adverse selection. In practice those problem are anticipated by the implementation of incentive – compatible constraint.

Keywords : Principles, Financing, Profit and Loss Sheering (PLS)
Islamic Banking.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul : PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Kajian Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasihat dan kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan, Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama, kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. DR. PAULUS HADI SUPRPTO, SH.MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.

3. Sekretaris Akademik, Ibu Ani Purwanti, SH, M Hum dan Bapak. Ibu staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
4. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Prof. H. Abdullah Kelib SH. selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan Masukan, nasihat, serta bimbingan sehingga selesainya tesis ini.
6. Pimpinan cabang Bank Syariah Muamalat Semarang beserta staff yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian, khususnya kepada Ibu Nur Aini Al-Haqi.
7. Rekan-rekan Angkatan 1999, yang menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi UNDIP.
8. Istri dan Anakku tercinta, SARI RAHMAWATI NOVE RITA ACHAQIE, ECA AYU INTANA ADHYAKSARI, HEYDITA RATU DEWINTASARI, dan ADI SUHARTONO yang dengan setia dan tulus mendorong serta memberikan semangat, untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak SURATNO dan IBU NARSEM, ucapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam ananda sampaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semarang, Nopember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Kerangka Teoritik	12
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kontribusi Penelitian	21
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Lokasi Penelitian	23
4. Sumber Dan Jenis Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Metode Analisa Data	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Terhadap Perbankan Konvensional	28
1. Ruang Lingkup Perbankan	28
1.1. Pengertian Bank	28
1.2. Aspek Hukum Perbankan	31
1.3. Kegiatan Usaha Perbankan	32
1.4. Bentuk Hukum Bank	34

2. Jenis-jenis Bank	35
2.1. Dilihat Dari Bidang Usahanya	35
2.2. Dilihat Dari Kepemilikannya	36
2.3. Dilihat Dari Fungsi dan Tujuan Usahanya ...	37
2.4. Dilihat Dari Operasionalnya	38
3. Sistem Bunga Dalam Bank Konvensional	39
3.1. Pengertian Bunga	39
3.2. Hukum Bunga Bank	41
3.3. Alasan Pembayar Pengambilan Bunga	43
B. Tinjauan Terhadap Bank Syariah	44
1. Ruang Lingkup Bank Syariah	47
1.1. Pengertian Bank Syariah	47
1.2. Pengaturan Hukum Positif Bank Umum Syariah	47
1.3. Landasan Syariah	48
1.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah	49
2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah	53
2.1. Hubungan Hukum Antara Bank (Shahibul Maal) dengan nasabah berdasar perjanjian Al-Mudharabah.	58
2.2. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dengan berdasar Perjanjian Al-Musarakah	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Muamalat	65
B. Prinsip bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah	81
1. Prinsip Al-Mudharabah	81
Pengertian Al-Mudharabah	84
Landasan Syariah	86
Jenis-jenis Al-Mudharabah	88
Manfaat dan Resiko Al-Mudharabah	89

2. Prinsip Musyarakah	90
Pengertian Al-Musyarakah	91
Landasan Syariah	92
Jenis-jenis Al-Musyarakah	93
Manfaat dan Resiko Al-Musyarakah	94
3. Prinsip-prinsip dalam Kegiatan	
Operasional Bank Syariah	95
C. Penerapan pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi hasil	
terhadap Nasabah Bank Syariah.....	98
1. Pembi	
ayaan Al-Mudharabah	98
Syarat-syarat dan Ketentuan bagi Hasil	100
Pihak-pihak yang terlibat Dalam Perjanjian	
Pembiayaan Al-Mudharabah	110
Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Al-	
Mudharabah	112
Manfaat Pembiayaan Al-Mudharabah	113
2. Pembi	
ayaan Al-Musyarakah	114
Syarat dan Ketentuan Bagi hasil	115
Manfaat dan Resiko Pembiayaan Secara	
Musyarakah	118
D. Hambatan Yang dihadapi Bank Syariah Muamalat Dalam	
Menerapkan Prinsip bagi Hasil Dalam Pembiayaan	
Terhadap Nasabah	120
Hambatan Penerapan Prinsip Bagi hasil	120
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	SKEMA AL-MUDHARABAH	59
GAMBAR 2	SKEMA AL-MUSYARAKAH	61
GAMBAR 3	KONSEP DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH	78
GAMBAR 4	KONSEP PRODUK PERBANKAN SYARIAH	79
GAMBAR 5	STRUKTUR ORGANISASI	80
GAMBAR 6	SKEMA TEKNIS PERBANKAN PEMBIAYAAN MUDHARAKAH	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Saat ini perbankan nasional Indonesia mengalami suatu “depresi” yang sangat berat untuk dipulihkan kembali sebagai sebuah lembaga yang sehat di dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Pemulihan sistem perbankan terkait satu dengan lainnya sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena bank berfungsi tidak hanya sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan pihak *lack of funds* (memerlukan dana), namun juga berfungsi sebagai *agent of development*¹ yaitu sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu berfungsi sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Arah Kebijakan Ekonomi Makro dalam GBHN 1999-2004, bahwa :

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000), hal.86

Perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan mengamankan proses pemulihan ekonomi dimana langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain memulihkan fungsi intermediasi perbankan.

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam.

Konsep perbankan syariah apabila dipandang dari ekonomi makro, maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Firman Allah SWT :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar”. (Al-Hadid : 7)

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan *dual banking system* harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem, sehingga bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua Undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

Perbedaan keduanya adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan sistem bunga yang diyakini umat Islam sebagai diharamkan memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung diskriminatif².

Sehubungan dengan bunga Bank Anwar Nasution mengemukakan beberapa pengaruh dengan adanya bunga Bank adalah sebagai berikut :³

Bahwa tingkat suku bunga yang mahal, dewasa ini telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi penggalian moneter dan kurs devisa, bahkan menurutnya tingkat suku bunga yang semakin mahal sejak tahun 1990 telah meningkatkan biaya operasi, sehingga menimbulkan high cost bagi ekonomi Indonesia.

Sedangkan bank umum yang mendasarkan pada prinsip syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik untuk memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.

Bank Syariah telah terbukti sangat resisten (tahan) terhadap krisis moneter sebagaimana diungkapkan Soebardjo Joyo Sumantoro yang menyatakan bahwa :⁴

Upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak bulan Juli tahun 1998 hingga Desember 2001, adalah upaya mengatasi dampak krisis dan peningkatan ketahanan sistem perbankan masa depan... Indonesia memiliki 40% saja perbankan yang beroperasi secara syariat tidak akan terkena krisis, apalagi semua beroperasi sesuai dengan syariat Islam.

² Muhaimin, *Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya di Indonesia*, Tesis UNDIP, 2001, hal.8.

³ Neni Sri Imaniati, *Sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis Undip 1997. hal 4

⁴ Soebardjo Joyo Sumantoro, *Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia* dalam majalah saksi No. 20, tahun II tanggal 13 Juni 2000, hal 9-21.

Bank Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, tujuan pengembangan sistem perbankan Syariah adalah terutama untuk memenuhi :⁵

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur, yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Bank umum yang mendasarkan prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

1. Pembiayaan berdasar penyertaan modal (musyarakah) ;
2. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah) ;
3. Pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) ;

⁵ Cecep K.Halim, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal.3.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Muamalat mempunyai legalitas institusional dengan diberlakukannya PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana PP No. 72 tahun 1992 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 30 tahun 1999.

Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penerapan Prinsip-prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah”.

Pada tanggal 17 Juni 2008, Perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan Syariah di tanah air.

Fenomena pesatnya pertumbuhan perbankan Bank syariah sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di dunia, bukan hanya di negara muslim tetapi juga di negara non muslim. Di kawasan Asia Tenggara, misalnya : Singapura telah berniat menjadikan negara sebagai pusat keuangan Islam (*Islamic Financial Hub*), sebagaimana diungkapkan menteri

senior sekaligus gubernur Monetary Authority Op Singapore, Goh Cho Tong, pada Agustus 2004.⁶

Keseriusan Singapura terhadap perbankan syariah ditunjukkan dengan mencari dukungan dan konsultasi dengan ahli perbankan syariah di Timur Tengah. Dengan pertumbuhan global sekitar 20% dan dana investasi sekitar U\$ 250 miliar/ U\$ 500 miliar. Singapura tidak mau ketinggalan menjadi bagian dalam pengelolaan perbankan syariah.⁷

Saat ini memang terjadi kompetisi besar-besaran di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia. Untuk memperebutkan berbagai transaksi ekonomi berbasis syariah. DBS Bank sebagai Bank dengan jaringan terbesar di Singapura, bertekad akan memiliki 60% saham di Bank Islam, sedangkan 22% akan diambil oleh investor dari beberapa orang maupun lembaga ekonomi dari Timur Tengah. Sebanyak 40% dari pemegang saham tersebut diperkirakan berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Yaman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab.⁸

Fenomena ketertarikan terhadap perbankan Syariah bukan semata-mata menyangkut Fiqih Muamalah, tetapi juga berkaitan dengan potensi perekonomian syariah sebagai alternatif dari sistem perekonomian. Tidak mengherankan jika Bank-bank terkemuka di dunia, seperti ; Chase Manhattan Bank, ANZ Bank, City Bank telah mengembangkan perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka Islamic Window.⁹

⁶ *Info Bank*, No. 319 (Oktober 2005) hal 25

⁷ *Ibid.*

⁸ *Info Bank* No. 343 (Oktober 2007) hal 23

⁹ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta 1999) hal XVII.

Dasar pemikiran pengembangan bank Syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Adalah kenyataan bahwa sebagian perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip Syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional.

Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan¹⁰.

Pasca Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan laju perbankan syariah memang terus tumbuh. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2001 total asetnya baru 2,72 triliun rupiah atau 0,25% dari total perbankan Nasional. Pada tahun 2004 angkanya meningkat 5 kali lipat menjadi 15,31 triliun rupiah atau 1,2%, dan pada akhir tahun 2006 naik menjadi sebesar 26,72 triliun rupiah atau 1,55%. Dari segi jaringan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup spektakuler. Pada tahun 2001 baru ada 101 kantor Bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS). Pada tahun 2005 jumlahnya melonjak menjadi 336 kantor,¹¹ dan akhir tahun 2007 bertambah menjadi 568 kantor.¹²

¹⁰ Syahril Sabirin, *Sambutan Gubernur Bank Indonesia Dalam Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Nopember 2007) hal 36

¹¹ *Info Bank*, No. 334 (November 2007) hal 30

¹² Diolah dari *Statistik Perbankan Indonesia* Vol 6 No.6 Mei 2008.

Agar industri perbankan syariah makin semarak, BI pun melakukan terobosan unik dengan mengeluarkan izin penggunaan kantor Bank Konvensional untuk memberikan layanan syariah. Al hasil jumlah outlet OC langsung mencapai 456 outlet pada tahun 2006 atau hampir menyamai jumlah kantor BUS atau UUS. Pada Juni 2007, setahun telah kebijakan OC bergulir, kantor layanan syariah atau outlet OC diprediksi bisa melampaui kantor BUS atau UUS yang telah berkiprah 15 tahun dinegara ini.¹³

Meski perkembangan perbankan syariah cukup bagus, tapi masih cukup berat untuk mencapai target pangsa pasar 5% pada tahun 2008 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Indonesia pun masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Di Indonesia pangsa pasar transaksi baru mencapai 2%, padahal Malaysia sudah mencapai 15%, sedangkan Brunai Darussalam 36%.¹⁴. Produk dan layanan inovatif saja tidak cukup untuk mengembangkan pasar syariah. Untuk itu dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan Syariah yang semakin meningkat. Adanya *lex specsialis* tentang perbankan syariah ini memang patut kita apresiasi, tetapi bagaimanapun undang-undang adalah sebuah produk politik yang bisa saja berbeda dengan aturan syariah, mengingat negara kita bukanlah negara Islam.

Sesuatu yang memprihatinkan jika penerapan dari prinsip bagi hasil saat ini justru mengecil dibanding dengan prinsip dengan pembiayaan lain.

¹³ *Info Bank*, No. 334. Loc. Cit

¹⁴ *Khalifah*, edisi 2 tahun 1 (19 Juli – 16 Agustus 2008) hal 24

Menurut Chopra¹⁵ saat ini praktek pembiayaan berbasis PLS melalui Mud Mudharabah dan Musyarakah hanya berkisar seperempat dari portofolio aset perbankan syariah. Di Indonesia sendiri saat ini dari total pembiayaan syariah senilai Rp. 34,09 triliun, jumlah pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 6,12 triliun atau 17,94% dari seluruh total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan mudharabah sebesar 6,5 triliun atau 19,11% dari seluruh total pembiayaan¹⁶.

B. PERMASALAHAN

Berlakunya hukum diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dimana fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, sekaligus sebagai *a tool of social engineering* maupun fungsinya sebagai pengintegrasian terhadap kepentingan yang berbeda menjadi prinsip yang mendasar apabila masyarakat menghendaki adanya perubahan di dalam suatu sistem hukum, maka fungsi hukum haruslah menempatkan kepada kepentingan masyarakat untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Dengan berlakunya sistem hukum perbankan yang mendasarkan pada prinsip Syariah (hukum Islam) dimana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan

¹⁵ Umar Chopra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta 2008) hal 10-11.

¹⁶ Diolah dari *Statistik* Perbankan Syariah Juni 2008

kehati-hatian dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Sistem perbankan yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dan bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah bank Syariah?
2. Apa hambatan yang dihadapi Bank Syariah?

C. KERANGKA TEORITIK

Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda, yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang berdasarkan pada sistem bunga dan perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Terbentuknya bank yang berdasar pada prinsip syariah merupakan suatu perubahan yang mendasar pada masyarakat yang menghendaki perubahan suatu sistem hukum, di mana fungsi hukum sebagai pengintegrasian terhadap kepentingan yang berbeda dapat menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Kegiatan usaha Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan bagian dalam sistem perbankan nasional Indonesia setelah mendapatkan legalitas institusional dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 (pasal 6 huruf m), yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, kemudian diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan landasan operasional berlakunya Bank Syariah.

Bank Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan aturan atau kaidah dalam hukum Islam berdasarkan pada Al Qur'an, Al-Hadits, Ijma' para sahabat dan qiyas ulama.

a. Sebagaimana firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ...” (Al Baqarah ayat 267)

b. Al-Hadits

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah (HR. Ahmad)

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :¹⁷

1. Aqidah :

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2. Syariah :

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

3. Akhlaq :

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadits nabi menyatakan Tidaklah sekiranya Aku diutus untuk menjadikan *akhlaqul karimah*.

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia

¹⁷ Achmad Baraba, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Majalah Buletin Ekonomi, Bank Indonesia Jakarta), hal.2

¹⁸ Didin Hafidhuddin, Pelatihan Perbankan Syariah, Tazkia Institute, dalam M. Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani : Jakarta, 2001), hal.8-9

hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan dengan ketentuan-Nya.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. (Al-Hadiid : 7)

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan – Nya kepada kalian ...” (An-Nuur : 33)

- 2) Harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut :
 - a) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT ;
 - b) Harta sebagai perhiasan hidup ;
 - c) Harta sebagai ujian keimanan ;
 - d) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan, zakat, infaq dan sedekah.
- 3) Pemilikan harta antara lain melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal sesuai dengan aturan-Nya.
- 4) Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah tidak ingat kepada Allah SWT, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.
- 5) Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggabsaban, curang dalam takaran dan timbangan melalui cara-cara yang batil dan merugikan, melalui suap menyuap.

Di dalam pandangan Islam, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembaliannya

berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.¹⁹ Secara umum riba adalah penambahan, pada hutang baik kualitas maupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit adalah riba yang diharamkan.

Landasannya dalam Al Qur'an Surah An-Nisa (4) / 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil”.

Jalan yang bathil dalam hal ini adalah pengambilan tambahan modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syari.²⁰

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadits merupakan sumber rujukan, selain Al Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur'an.

Firman Allah SWT :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Qs. Arrum : 39)

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka

¹⁹ Tazkia Institute, Riba dan Permasalahannya, (Jakarta, 1999), hal.1

²⁰ Ibid, hal.12

banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena merakan memakan harta orang dengan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Q.S. An Nisa : 160-161)

“Hai orng-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Qs. Ali Imran : 130).

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Qs. Al Baqarah : 278-279)

Larangan riba dalam Hadits sebagaimana isi surat Rasulullah SAW kepada Itab bin Usaid, Gubernur Mekkah, agar kaum Tahif tidak menuntut hutangnya (riba yang telah terjadi sebelum kedatangan Islam) dari Bani Mughirah.

“Ingatlah kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Hadits ini merupakan amanat terakhir Rasulullah saw pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya pada ayah mengapa beliau melakukannya ? Ayahku menjawab Rasulullah saw melarang untuk menerima harga anjing dan darah, dan beliau juga melarang pekerjaan membekam, menerima dan memberi riba serta Beliau mencela para pembuat gambar (HR. Bukhari)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda :

Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta

anak yatim dan mereka yang tidak bertanggungjawab / menelantarkan ibu bapaknya”.

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud bank berdasar prinsip bagi hasil adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 huruf (1) PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasar prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP No. 72 tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasar Syariah yang digunakan oleh Bank berdasar prinsip bagi hasil dalam :

1. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya ;
2. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja ;
3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No. 72 tahun 1992).

Dalam penelitian ini yang dimaksud, pembiayaan terhadap nasabah dalam Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 tahun 1998 adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman, melainkan pembiayaan. Kegiatan bank syariah dalam hal modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah, dan pihak bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharir*).

Pembiayaan dalam Bank Syariah, menurut sifat penggunaannya dapat terbagi atas pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal, kerja dan pembiayaan investasi.²¹

Bank Syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Baraba²² antara lain menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan

²¹ Muhammad Syafii Antonio, Op.cit, hal.160

²² Achmad Baraba, dalam Nasser Atorf, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah Produk-produk dan Tantangannya, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (Bank Indonesia), Vol.2 No.3 Desember 1999, hal 4

untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun, sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* (perjanjian antara pihak pertama atau pemilik dana dan pihak kedua atau pengelola) dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Di samping itu juga dikenal produk dengan musyarakah yaitu perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

Berbeda dengan bank konvensional (bank umum yang selama ini kita kenal), imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum merupakan keseluruhan azas-azas atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.²³

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa dalam mempelajari hukum, hendaknya dipahami sekurang-kurangnya tiga konsep mengenai hukum, yaitu :²⁴

²³ Lili Rasyidi.IB Wyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung, 1993), hal.16

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum (Semarang, 1999), hal.1

- 1) Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan ;
- 2) Hukum sebagai suatu norma kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat ;
- 3) Hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang berbentuk pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum perbankan syariah merupakan alternatif dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi sesuai ketentuan-Nya. Sehingga dipandang perlu mengembangkan instrumen sebagai pelengkap maupun produk-produk yang ditawarkan di dalam bekerjanya sistem hukum perbankan syariah.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam suatu pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (*mudharabah*)²⁵. Berbeda dengan musyarokah, keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami, bagaimana prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah?

²⁵ M.Nejatullah Siddiqi, terjemah Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta, 1996), hal.15

2. Untuk memahami, bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah bank Syariah?
3. Untuk memahami, apa hambatan yang dihadapi bank Syariah dan bagaimana seharusnya?

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perbankan berdasarkan Syariah.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi policy maker dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perbankan, khususnya Bank yang mendasarkan pada prinsip Syariah.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan, “Suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris

yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.²⁶

Menurut Abdullah Kelib²⁷, metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum dan perbandingan hukum²⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai sistem perbankan yang berdasarkan pada syariah dengan prinsip bagi hasil. Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penerapan

²⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.28

²⁷ Abdullah Kelib, Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekunder, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH Undip, No. 5 – 1995, hal.3 dari pendapat Suharsini Harikunto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek), Jakarta, Rineka Cipta, 1993. hal.12

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, (Jakarta, 1985) Hal 14-15.

prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah pada Bank Muamalat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Muamalat Semarang. Dipilihnya Bank Syariah Muamalat Semarang dikarenakan Bank ini berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Semarang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga sudah barang tentu memiliki problematika yang perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah Bank yang mendasarkan pada syariah dengan prinsip bagi hasil.

4. Sumber dan Jenis Data

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara).

Penelitian kepustakaan antara lain terdiri dari :

a. Sumber hukum primer, yaitu :

- 1) Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 2) Ketetapan-ketetapan MPR :

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN

- 3) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan
 - Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bagi Hasil yang dirubah dengan PP No. 30 tahun 1999.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 tentang Penjabaran dari PP No. 72/ 1992.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasar prinsip Syariah (Pasal 28).

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu :

- Dokumen-dokumen sistem perbankan konvensional maupun syariah dengan prinsip bagi hasil ;
- Buku-buku literatur mengenai hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan perbankan konvensional dan syariah ;
- Hasil Penelitian Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ;
- Berbagai Jurnal, makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara data kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan / literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam focus permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga melakukan pengumpulan data (wawancara) di Bank Syariah Muamalat Semarang.

6. Metode Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a) Tahap pertama, mendasarkan pada teori-teori, digunakan dengan analisis normatif. Dalam tahap ini akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Bank Muamalat.
- b) Tahap kedua, mendasarkan pada pendekatan Sosio Legal hukum dikaitkan dengan masalah sosial adalah menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yang dilakukan melalui : wawancara dan penyelidikan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari empat bab, yang tersusun secara berurutan, dari Bab I sampai Bab IV.

Bab I dalam tulisan ini merupakan pendahuluan yang berisikan : uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teoritik, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dalam tulisan ini berisi dua sub bab yang terdiri dari : sub pertama uraian mengenai tinjauan terhadap perbankan konvensional, yang membahas ruang lingkup perbankan, jenis-jenis bank, sistem bunga dalam bank konvensional.

Sub bab kedua berisi tinjauan terhadap bank syariah yang membahas : ruang lingkup bank syariah, sistem pembiayaan Bank Syariah.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisa dalam tulisan ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut sejarah berdirinya bank syariah bank muamalat, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah, yang membahas : Prinsip Al-Mudharabah, prinsip Musyarakah, Prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional bank Syariah. Penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah bank Syariah, yang membahas : pembiayaan al-mudharabah, pembiayaan al-musyarakah.

Hambatan yang dihadapi bank Syariah Muamalat dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Bab IV dalam tulisan ini berisi uraian mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berdasar dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL

1. Ruang Lingkup Perbankan

1.1. Pengertian Bank

Pengertian bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah :

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan perbankan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Tercatat sebagai Bank pertama dibangun pada tahun 2000 SM di Babylonia²⁹. Bank ini telah mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan pada debiturnya. Pada tahun 500 SM di Yunani, didirikan greek temple, suatu lembaga semacam Bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan Bank.

Pada zaman Romawi, operasi perbankan lebih berkembang dan rumit, dibandingkan masa sebelumnya. Bank telah mulai menerima deposito, memberikan kredit dan mentransfer modal. Namun dengan hancurnya kota Roma pada tahun 509 SM. Perbankan berhenti berkembang. Baru pada tahun 527 -565, kegiatan perbankan berjalan

²⁹ *Info Bank*, No. 124 (April 1990) hal 2

lagi didukung oleh Kaesar Yunani yang mengkodivikasikan hukum romawi dikonstantinovel³⁰.

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Itali, yaitu kata banca yang berarti bangku atau tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usaha di atas bangku-bangku³¹.

Menurut A. Abdurrahman, Bank adalah suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Sedangkan menurut Henry Cambell dalam Blacks Low Dictionariy (1968). Bank adalah suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan Bank Belles atau Bank Notes. Namun demikian fungsi bank yang orisinil hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, mas dan lain-lain³².

Menurut kamus, istilah hukum Pockema Andrea yang dimaksud dengan bank adalah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek, hanya dapat diberikan kepada Bankir, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga

³⁰ *Ibid*

³¹ Lembaga kajian hukum ekonomi, *sejarah dan perkembangan metode perbankan di Inndonesia* (Jakarta 1990) hal 1

³² Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung 1999) hal 13 -14.

yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga³³

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank yang dimaksudkan sebagai suatu jenis *pranata finansial* yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³⁴

Noah Webster³⁵ menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai berikut :

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dijelaskan pengertian perbankan adalah sebagai berikut :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Menurut Abdurrahman Perbankan³⁶ (*banking*) ialah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen yang

³³ Zaenal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta) hal 4

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute dengan Bank Indonesia, (Jakarta, 1999), hal 95-96.

³⁵ Noah Webster, Dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung, 1999) hal.13.

dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan³⁷ bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank sebagai Badan Hukum secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Menurut O.P Simorangkir³⁸ pengertian Bank diartikan sebagai :

“Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercayai oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”

1.2. Aspek Hukum Perbankan

Munir Fuady³⁹ mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*banking law*), yakni merupakan :

“Seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, *doktrin* dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.”

Muhammad Djumhana⁴⁰ menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia.

³⁶ Abdurrahman, dalam Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Mandar Maju, Bandung, 2000) hal 1.

³⁷ Abdurrahman, A dalam Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, Buku Kesatu (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal 13.

³⁸ O.P Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hal 1.

³⁹ Munir Fuady, Op, Cit hal 5.

Dengan kata lain bahwa **Hukum Perbankan**, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi efisiensi dan eksistensinya, serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain.

1.3. Kegiatan Usaha Perbankan

Menurut Djumhana⁴¹, bahwa kegiatan usaha bank secara umum adalah sebagai berikut :

Kegiatan usaha bank di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kegiatan usaha perbankan harus sesuai dengan jenis banknya.

Kegiatan pokok dari suatu bank umum dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

⁴⁰ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1.

⁴¹ Ibid, hal 5.

- 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia ;
 - 5) Obligasi ;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya ;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
 - j. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, uang kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia ;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesemua kegiatan bank sebagaimana disebutkan diatas, pada prinsipnya merupakan kegiatan usaha suatu bank (Bank Umum maupun BPR) yang terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

- a. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- c. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan fee based income.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau tabungan pada bank lain.

1.4. Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suatu jenis usaha. Dengan adanya suatu bentuk hukum tertentu, maka akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga Pengaturan bentuk hukum bank diatur dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Koperasi.
 - c. Perusahaan Daerah.

- 2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat, dapat berupa salah satu dari :
 - a. Perusahaan Daerah.
 - b. Koperasi.
 - c. Perseroan Terbatas (PT)
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

2. Jenis-jenis Bank

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu :⁴²

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga Perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut :⁴³

⁴² Baca, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2.1. Dilihat dari Bidang Usahanya

Bank ditinjau dari jenisnya ada 2 macam, yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum mempunyai 2 bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 :

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR mempunyai 2 bentuk yaitu BPR dan BPR Syariah.

Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 :

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2.2. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni :⁴⁴

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seperti BNI, BRI, BPD dan lain-lain.

⁴³ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hal 3-7.

⁴⁴ Sentosa Sembiring, Ibid, hal 7.

2. Bank milik Swasta :

- 1). Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia ;
- 2). Swasta Asing, artinya modal tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan ;
- 3). Disamping kedua jenis bank ini, dalam dunia Perbankan dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran.

Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan / atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Bank Milik Pemerintah Daerah, adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2.3. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya

Dilihat dari segi fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu :⁴⁵

1. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, pengusaha moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada ;

⁴⁵ Muhammad Djumhana, Op.Cit, hal 83-84

2. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).
3. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan / atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2.4. Dilihat dari operasionalnya

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni :⁴⁶

⁴⁶ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hal 7.

1. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Non Devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing.

3. Sistem Bunga dalam Bank Konvensional

3.1. Pengertian Bunga

Pengertian bunga sebagaimana dinyatakan oleh Eri Sudewo⁴⁷, bahwa bunga adalah pertumbuhan atau penambahan nilai. Bunga merupakan perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang secara berlebihan. Laba berbeda dengan bunga. Perbedaan laba dengan bunga menurut Eri Sudewo adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Bunga mengkondisikan pemilik tak memiliki resiko. Setelah akad pinjaman disepakati, pemilik uang tak memiliki kepentingan lagi dengan peminjam. Mustahil pemilik uang rugi karena bunga telah ditentukan. Karena seluruh resiko ditanggung peminjam, maka si kaya bakal menjadi kaya, si miskin akan lebih miskin.
- b. Dalam setiap perdagangan, resiko merupakan hal normal. Laba merupakan hasil usaha, inisiatif dan efisiensi. Berbeda dengan bunga yang tak kenal resiko, juga tak pernah peduli pada dinamika usaha yang dijalankan peminjam.
- c. Dalam perdagangan, saat barang bertukar dengan uang (transaksi) otomatis selesai, sedang dalam bunga saat pinjaman diberikan itu merupakan awal masalah. Pemilik uang tidak pernah berhenti menagih bunga dan peminjam menanggung resiko.

⁴⁷ Eri Sudewo, Ekonomi Bebas Bunga, Dalam kata pengantar Buku PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil, (Bandung 1999), hal 20.

⁴⁸ Ibid, hal 24.

- d. Perdagangan adalah proses produksi karena ada kondisi penciptaan lapangan kerja. Dengan bekerja, manfaatnya bukan hanya imbalan yang diterima pekerja, sebaliknya bunga mengenalkan pada kondisi krisis, bunga telah menjadi beban karena telah menjadi biaya produksi.
- e. Bunga menjadi pemicu inflasi, untuk membayar utang, peminjam harus menaikkan harga barang dan kadang memangkas upah buruh.

Sebagai misal bunga deposito dalam sistem bank konvensional akan berbeda pada bank syariah yang berdasar prinsip bagi hasil. Pada bank konvensional, besar kecilnya bunga diperoleh deposan tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito. Sedang pada bank syariah, besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank dan jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Dalam pandangan bank konvensional, imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentasi tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional. Bunga bank dalam bahasa Fiqih diidentikkan dengan riba, sedang menurut bahasa (etimologis) bermakna *ziyadah* (tambahan).⁴⁹

3.2. Hukum Bunga Bank

Didalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa :

⁴⁹ Setiawan Budi Utomo, 2001, "Jawaban Tuntas Masalah Bunga" Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga, No. 10 Tahun III, hal 37.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian pasal tersebut diatas, bahwa dasar hukum adanya bunga karena suatu jasa imbalan dari pihak peminjam atas kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain bunga merupakan kewajiban bagi peminjam setelah menerima modal atau dana yang telah diberikan pihak kreditur.

Hukum bunga bank konvensional, menurut pandangan ajaran Islam, sebagaimana ditetapkan dalam sidang di Bandar Lampung tahun 1982 yang dikenal dengan Keputusan Lajnah Bahsul Masail, antara lain :⁵⁰

Terdapat tiga pendapat ulama yaitu :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente;
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat;
3. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

Pendapat-pendapat tersebut adalah :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram;
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh; Bunga konsumsi sama dengan

⁵⁰ M. Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Setiawan Budi Utomo, ibid, hal.90-91.

riba, hukumnya haram, bunga produktif tidak sama dengan riba hukumnya halal;

Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh;

Bunga bank itu tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

- c. Ada pendapat yang menyatakan hukumnya subhat (tidak identik dengan haram).

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur'an, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam.⁵¹ Istilah riba disebutkan dalam (empat) Surat dalam Al Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Ali Imron ayat 130, Surat An-Nisa ayat 29, 161 dan Surat Ar-Ruum ayat 39. Ayat-ayat tersebut diatas masing-masing menentukan mengenai larangan riba yang bunyinya sebagai berikut :

- a. Surat An-Nisa ayat 29 dan 161 :

1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (QS. An-Nisa : 29).
2. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang diantara kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Ayat 161).

- b. Surat Ar-Ruum ayat 39 :

Dalam sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

⁵¹ Elias, G. Kazarin, Islamic Versus Tradisional Banking, Financial Inovation in Egypt Boulder, dalam Sutan Remy Sjahdeini (Nestview Press, 1993 hal 48), Op.Cit hal 6.

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Adapun larangan riba dalam Hadits tersurat dalam amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau menekankan pelarangan riba. Beberapa Hadits Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba diantaranya adalah :⁵²

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

3.3. Alasan Pembenaar Pengambilan Bunga

Walaupun secara jelas ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun Hadist, melarang adanya riba (bunga bank), namun masih saja ada cendekiawan yang berusaha mencari alasan untuk membenarkan pengambilan bunga. Diantara alasan yang sering digunakan untuk menghalalkan bunga adalah seperti :⁵³

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Dalam arti belum beroperasinya bank tanpa bunga (Bank Syari'ah).

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam keadaan darurat Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

“.....Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia (1) tidak menginginkannya dan (2) tidak (pula)

⁵² Kesemua Hadits tersebut dikutip dari Terjemahan Subulussalam Bab Riba hal 125.
⁵³ M. Syafii Antonio, Op.Cit, hal. 40.

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Baqarah : 173).

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi, diperkenankan⁵⁴.

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”

B. TINJAUAN TERHADAP BANK SYARIAH

Istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah, yang secara internasional terkenal dengan istilah Islamic Banking atau juga disebut juga dengan interest-free Banking⁵⁵. Secara etimologis, kata “banco” dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur’an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti : zakat, sodaqoh qhonimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan Ekonomi.⁵⁶

⁵⁴ Kahar Masyhur, Beberapa Pendapat tentang Riba, (Kalam Mulia, Jakarta: 1999), hal. 56.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta 2005 hal 13

⁵⁶ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Alfabeth*, (Jakarta 2002) hal 2-3.

M. Amim Aziz, mendefinisikan bank adalah lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan pada masyarakat berupa pinjaman, sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung yang mengalami surplus dana dengan pinjaman yang mengalami defisit dana dalam membiayai usaha yang dilakukan⁵⁷. Secara lengkap definisi bank juga dijelaskan Muhammad, yang mengatakan bahwa bank adalah lembaga pranata keuangan atau bisa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama⁵⁸.

Kelahiran Bank Syariah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadat), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat). Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Firman Allah SWT :

“.....Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.....” (Al-Maa'idah : 418).

Dengan demikian hubungan dalam keseharian termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang

⁵⁷ M. Amim Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Banki, Jakarta, 1992. hal 1

⁵⁸ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Tes*, (Yogyakarta, 2000) hal 63

diperbolehkan oleh syariat Islam. Al Qur'an sebagai syariat utama melarang mengenai riba. Firman Allah SWT :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imron : 130).

Dalam Ushul Fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa “maa laa yatimmal-wajib illa bihifa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Dan karena pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas⁵⁹.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memunut maupun meminjami dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbaikan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut⁶⁰ :

“ Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transportasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah”.

⁵⁹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke 3 (Jakarta 2008) hal 14 -15

⁶⁰ Bank, Indonesia *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta

1. Ruang Lingkup Bank Syariah

1.1. Pengertian Bank Syariah

Di dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Syariah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada AL QUR'AN, Hadits, Ijma para sahabat dan Qiyas Ulama.

Di dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan Pengertian prinsip syariah :

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
(Pasal 1 ayat 13).

1.2. Pengaturan Hukum Positif Bank Umum Syariah

Sejak tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 7 Tahun 1992 juncto Pasal 13 huruf (c) UU No. 10 Tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik untuk Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip syariah, melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan berdasar prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa : Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

1.3. Landasan Syariah

Landasan syariah sebagaimana tersirat didalam Al Qur'an, adalah sebagai berikut :

1. Surat Luqman : ayat 34, artinya :

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.”

2. Surat Ali Imran : ayat 130, artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

3. Surat Ar-Ruum : ayat 39, artinya :

“Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.....”

4. Al Baqarah : ayat 275-279, artinya :

Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.....

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

1.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, meliputi :

1. Giro berdasar prinsip wadiah

Sesuai dengan prinsip Al Wadiah, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa ijin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank, atas dasar kebijaksanaan bank dapat memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada bank.

2. Tabungan berdasar prinsip wadiah atau mudharabah.

1) Deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah.

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2) Penerimaan dana lainnya

Bank bagi hasil juga bisa menerima dana dari bank serta pihak lain atas dasar Al Wadiah, Al Mudharabah atau Al Qardul Hasan, yang berupa zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), yaitu :

- a) ZIS yang harus segera disalurkan, dalam hal ini Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai penyalur;

b) ZIS merupakan titipan dan Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut, sedang waktu penyaluran terserah Bank Syariah.

b. Melakukan penyaluran dana melalui :

1. Transaksi jual beli berdasar prinsip :

- a) Murabahah
- b) Istishna
- c) Ijarah
- d) Salam
- e) Jual beli lainnya

2. Pembiayaan Bagi Hasil berdasar :

- a) Mudharabah
- b) Musyarakah
- c) Bagi hasil lainnya

3. Pembiayaan lainnya berdasar prinsip :

- a) Hiwalah
- b) Rahn
- c) Qard

- c. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli hiwalah.
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- g. Menyediakan tempat, untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah.

- h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penata usahannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
- j. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadiah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, menetapkan bahwa BPR Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi :

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi :
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
- 2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - 1) Murabahah
 - 2) Istishna
 - 3) Ijarah
 - 4) Salam
 - 5) Jual beli lainnya.

b. Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan prinsip :

- 1) Mudharabah
- 2) Musyarakah
- 3) Bagi hasil lainnya.

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

- 1) Rahn
- 2) Qardh
- 3) Melakukan kegiatan lain sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.

2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme atau proses dari pola pembiayaan tersebut.

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (debt financing) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari⁶¹ :

⁶¹ Kajian Hukum Prajoto dan Associates, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Desember 2006, Makalah tidak diterbitkan

- a. Bagi Hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai').
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina.
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Pembiayaan ada yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan bagian laba yang artinya adalah distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan⁶². Meskipun demikian ada yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah Profit and Loss Sharring (PLS). Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (Financial) yang luas kepada peminjam (Debitur), berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan (financial) sistem bunga pada dana perbankan konvensional yang risikonya ditanggung oleh pihak peminjam⁶³. Penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah yang kedua (Profit and Loss sharing) dari pada profit sharing karena prinsip bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi, tetapi juga kerugian.

Islam menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, hal ini didasarkan pada ;⁶⁴

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.

⁶² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta 2005) hal 105

⁶³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta 2004) hal 90.

⁶⁴ Muhammad Op Cit, hal 107.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah
5. Membangun organisasi yang berprinsip syariat, sehingga terjadi proses yang kuat untuk membantu yang lemah
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan, serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁶⁵

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun untuk keperluan perdagangan.

⁶⁵ Rifaat Ahmad Abdul Karim dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dalam Teori dan Praktek, (Gema Insani, Jakarta : 2001), hal 160

- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai pihak penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Prinsip bagi hasil menurut syariah yang sering dipakai adalah *al mudharabah* dan *al musyarakah*. Perjanjian *al mudharabah* maupun *al musyarakah* ini keberadaannya diatur didalam hukum positif sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 menjelaskan bahwa :

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 72 Tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan / pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
Kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 3 PP No. 72 Tahun 1992, bahwa :

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Di dalam suatu hubungan hukum akan menimbulkan aspek-aspek hukum yang merupakan unsur esensial dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara Bank Syariah dan nasabahnya, maka muncul pertanyaan hukum apakah yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara Bank Syariah yang bersangkutan dengan nasabah pengguna jasa Bank Syariah.

Sutan Remi Sjahdeini,⁶⁶ bahwa hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabah dalam hal terjadi sengketa, diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata merupakan hukum positif.

Ditinjau dari aspek hukum perdata, ada beberapa unsur-unsur pokok yang melandasi pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, yaitu Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian adalah sah, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum, serta dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian berlaku azas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata). Berdasarkan azas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi

⁶⁶ Sutan Remi Sjahdeini Dalam Neni Sri Imaniati, Kesiapan hukum Ekonomi Indonesia Dalam mengantisipasi perbankan syariah, (seminar nasional Unisba, Bandung, 2000) hal 10.

perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum.

2.1. Hubungan hukum antara Bank (*shahibul maal*) dengan nasabah berdasar perjanjian al mudharabah.

Perjanjian *Mudharabah*, adalah suatu kegiatan perbankan Islam yang merupakan *trust finance* atau pembiayaan berdasarkan kepercayaan.⁶⁷

Dalam terminologi hukum, mudharabah adalah suatu kontrak, dimana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, dimana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

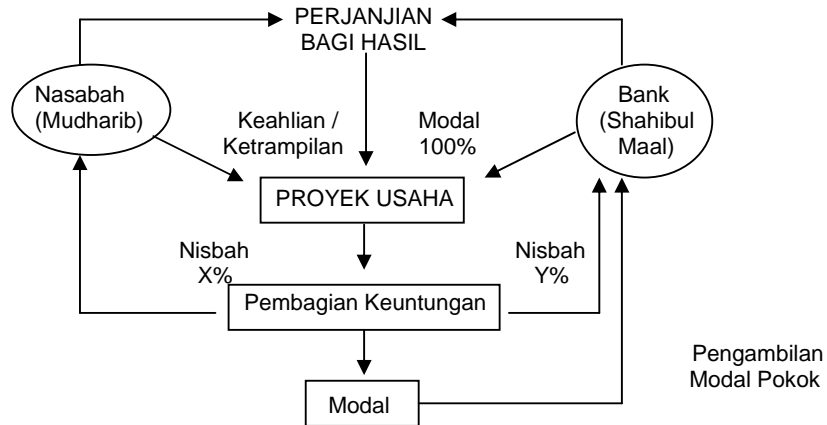
Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya apabila pengelola lalai harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum perjanjian al mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

⁶⁷ Adi Bastian Salam, Kedudukan Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, 2000, Bengkulu), hal 18.

Gambar I

Skema Al Mudharabah



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah sebagaimana tersebut dalam skema di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

- 1) Hak dan kewajiban Bank (*shahibul maal*) yaitu :
 - (a) berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan mudharib (pengelola usaha);
 - (b) berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan;

- (c) berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
 - (d) berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.
- 2) Hak dan kewajiban Mudharib, yaitu :
- (a) berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha;
 - (b) berkewajiban menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya;
 - (c) berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank;
- 3) Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

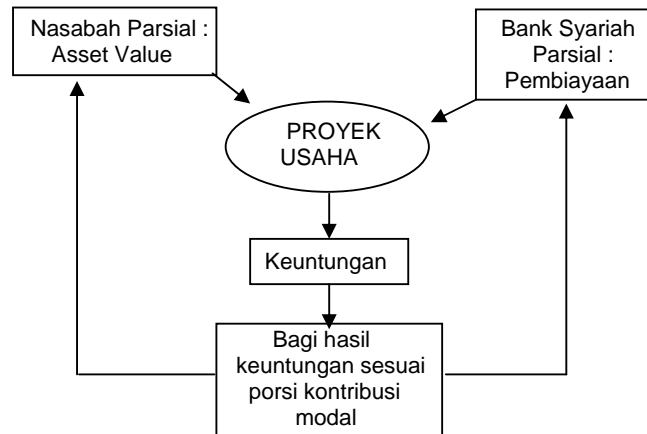
2.2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dengan berdasar perjanjian al musyarakah

Perjanjian musyarakah yaitu pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.

Dengan kata lain al musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.

Secara umum, perjanjian al musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2. Skema Al Musyarakah



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al musyarakah* sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasarkan perjanjian *al musyarakah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank, (*shahibul maal*)
 - a) berkewajiban membiayai suatu usaha;
 - b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
 - c) berhak ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;

- d) berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
 - e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.
2. Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :
- a) berkewajiban memberikan kontribusi dana atau menyertakan modalnya pada suatu usaha;
 - b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
 - c) berhak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
 - d) berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
 - e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdara.

Oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian (azas kebiasaan).⁶⁸

Menurut Pasal 1347 KUHPerdara, hal-hal yang menurut kebiasaan yang selamanya diperjanjikan secara diam-diam, dianggap telah dimasukkan

⁶⁸ Sultan Remi Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, opcit, hal. 11

pula ke dalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian itu tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Mengkaji dari aspek hukum jaminan, pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah.

Ketentuan tersebut diatas, menunjukkan bahwa agunan atau jaminan diberlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Secara umum Undang-Undang sudah mengatur tentang jaminan yang dikenal dengan asas umum hukum jaminan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa :

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, mengandung risiko, sehingga perlunya bank syariah menambahkan adanya agunan sebagai jaminan. Sebagaimana tersirat di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

Disamping harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, dalam arti keyakinan atau

kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada usaha tertentu, dengan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya, sedangkan kerugian di tanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha atau proyek secara bersama atas prinsip bagi hasil, sesuai dengan penyertaannya, dimana keuntungan dan kerugian di bagi secara profesional sebagai mana kesepakatan awal.⁶⁹

⁶⁹ Merfin K Lewis dan Latifah dan M.Al Qoud, Perbankan syariah: Prinsip praktek dan prospek (Jakarta 2007) hal 74

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Syariah Muamalat

A. Sejarah berdirinya Bank Syariah Muamalat.

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya, Anwar Qureshi (1946), Nacim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952)⁷⁰. Awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketertidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dari nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Perintisan penerapan sistem profit telah ada sejak tahun 1940an yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia⁷¹. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmad el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir⁷².

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan mulai beroperasi bulan Mei 1992, Dengan dukungan nyata dari

⁷⁰ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, cet. 1 (Yogyakarta Ekonisya-FE UII, 2003) hal 19

⁷¹ Fathurrahman Djamil, Urgensi undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, jurnal hukum bisnis

⁷². Ibid

eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Syariah Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84.000.000.000, 00 (delapan puluh empat miliar rupiah) pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam miliar rupiah).

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya 2 (dua) tahun setelah didirikan, Bank Syariah Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di-Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang telah dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990 an Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Syariah Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah). Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp.39.300.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Syariah Muamalat mencapai pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada

RUPS tanggal 21 Juni 1991 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Syariah Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Syariah Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Syariah Muamalat berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru-Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Syariah Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat. Bank Syariah Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru-Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru-Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda pertama pada tahun ke dua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Syariah Muamalat pada tahun ke tiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kita dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Syariah Muamalat tetap merupakan Bank Syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp.5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah), modal pemegang saham sebesar Rp.269.700.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) serta perolehan laba bersih sebesar Rp.48.400.000.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) pada tahun 2004.

Wacana perbankan syariah di tanah air dapat dilepaskan dari masih adanya keengganan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa konsep bunga yang diterapkan bank (konvensional) mengandung unsur riba, sementara bank-bank yang berprinsip syariah (non-Ribawi) waktu itu belum ada. Kekhawatiran ini ter refleksikan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Salah satu ormas Islam Indonesia, Muhammadiyah memandang bahwa bunga bank dari bank-bank milik swasta hukumnya haram, sedangkan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasabihat⁷³.

Perbedaan keputusan hukum bunga bank pemerintah dan swasta tersebut berkaitan dengan misi yang diemban bank pemerintah berbeda dengan bank swasta, di samping tingkat suku bunga bank pemerintah lebih rendah dari bank swasta⁷⁴.

⁷³ Himpunan putusan majelis Tarjih Muhammadiyah, cet. 3. (Yogyakarta) hal 304-306.

⁷⁴ Muslimin H. Kara. *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2005) hal 89-90.

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masail yang digelar di Lampung pada tahun 1982 mengeluarkan tiga pendapat yang saling bertentangan, berkaitan dengan bunga bank. Pendapat yang saling bertentangan tersebut dapat dipahami mengingat Lajnah Bahtsul Masail membuka keputusan bersama organisasi, namun merupakan hasil penyaringan opini dari para ulama terhadap suatu masalah⁷⁵.

Polemik tentang bunga bank tersebut menjadi salah satu sebab keinginan umat Islam akan adanya perbankan Islam sebagai solusi atas perbedaan pendapat umat Islam dalam masalah bunga bank.

Dalam sejarah perbankan Islam, terdapat kelompok profesional yang membedakan diri dari kelompok intelektual. Jika kelompok intelektual berorientasi pada teori, maka kelompok profesional berorientasi pada praktik. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan Fiqih Muamalah ke dalam praktik, tentunya setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh suatu dewan syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah⁷⁶.

Penerapan prinsip bagi hasil

Secara umum operasional Bank Syariah Muamalat dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian⁷⁷ :

⁷⁵ A. Aziz Masyhuri, *Masalah keagamaan Muktamar dan Munas Nahdlatul Ulama*: (Surabaya 1997) hal 21.

⁷⁶ M. Dawan Rahardjo, Menegaskan, Syariah Islam dibidang Ekonomi, Kata Pengantar dalam Adiwarman. A. Karim. Opcit. Hal XXIII

⁷⁷ Wawancara dengan Nur Aini Al-Haqi, *Sekretaris Bank Syariah Muamalat Semarang*, tanggal 10 Maret 2008.

- a. Tabungan, Giro dan deposito.
- b. Pembiayaan.
- c. Pembiayaan perdagangan.
- d. Pelayanan lain.

Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariah Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasional ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk, dan yang paling penting masing-masing jenis pengoperasian dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip Syariah.

- a. Tabungan, Giro, Deposit.

Bank Syariah Muamalat menerima deposit dari nasabah melalui beberapa jenis rekening, diantaranya :

- 1). Rekening giro;
- 2). Rekening tabungan mudharabah;
- 3). Deposito mudharabah mutlaqah;
- 4). Deposito mudharabah muqayyadah;

Rekening tersebut di atas, dioperasikan dengan kontrak wadiah dan mudharabah.

Dalam pengoperasiannya memakai instrumen kontrak wadiah, yang dimaksud dengan wadiah adalah mewakilkan kepada orang lain untuk memelihara hak milik. Simpanan giro ini pada dasarnya adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindah bukuan atau transfer dari perintah membayar lainnya. Pada simpanan giro ini dikenakan biaya administrasi, namun

karena dana yang tersimpan di bank diizinkan untuk diputar oleh bank, maka kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bonus atau jasa giro, sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bank.

Selanjutnya Bank Syariah dalam pengoperasiannya juga memakai instrumen kontrak *Mudharabah*. Mudharabah merupakan simpanan pemilik dana bank yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam pengoperasiannya ada dua bentuk, pertama bank memberikan kebebasan untuk menginvestasikan dimana saja yang dapat memberikan keuntungan. Dalam hal ini bank sebenarnya berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan pengusaha. Sebagai perantara bank berhak mendapatkan persentase khusus dari Mudharabah yang dilaksanakan. Pada dasarnya pemberian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pemodal yang penting persentase ditetapkan dari awal.

Bentuk sistem Mudharabah pada Bank Syariah adalah penyimpanan uang nasabah di bank, kemudian bank bertindak langsung sebagai pengusaha dengan melakukan berbagai bentuk transaksi perdagangan seperti murabahah dan musyarakah. Nisbah keuntungan juga sama seperti yang pertama. Dalam pengoperasiannya Bank Syariah Muamalat tidak melaksanakan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabungan Mudharabah, tabungan ini merupakan simpanan pemilik dana pada bank yang penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan syarat-

syarat tertentu yang diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank (80% untuk penyimpanan dana dan 20 % untuk bank) yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam –meminjam dalam bentuk piutang qardhi, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷⁸

Bank Syariah dalam kegiatannya selalu terlibat dengan berbagai jenis kontrak-kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah.

Diantara jenis kontrak yang dioperasikan adalah :

⁷⁸ Ketentuan umum Bab I, Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, poin 25.

- 1). Al-mudharabah.
 - 2). Al-Musyarakah.
- c. Pembiayaan Perdagangan.

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan modern, menawarkan berbagai produk yang menarik untuk dimanfaatkan oleh para nasabah. Pelayanan yang diberikan komprehensif, baik untuk pembiayaan jangka panjang maupun untuk pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk putaran modal bagi para pelaku bisnis.

Antara pembiayaan perdagangan yang telah dibuatkan produknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Kredit (letter of credit) dibawah prinsip alwakalah, al-musyarakah, dan al-murabahah.
2. Surat jaminan
3. Pembiayaan modal kerja dibawah prinsip al-murabahah.

Ad.3.1.Surat Kredit.

Apabila para pedagang melakukan transaksi ekspor atau impor melakukan surat kredit, agar transaksi mereka berjalan lancar, atau masing-masing pelaku bisnis dapat melayani transaksi yang mereka lakukan, hingga kekhawatiran tidak muncul antara sesama mereka. Dalam hal ini Bank Syariah Muamalat menyediakan beberapa bentuk fasilitas kontrak.

3.1.1.Surat Kredit dibawah Prinsip Al-Wakalah.

Al-Wakalah adalah menyerahkan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan tugas yang akan dilakukan oleh seorang yang punya wewenang untuk itu. Contoh dalam hal ini adalah Sdr.C mewakilkan kepada Sdr.D untuk membeli sekilo emas, Sdra.D membeli dan kemudian menyerahkan emas yang dibeli kepada Sdr.C dalam hal telah terjadi sesuatu yang disebut Al-Wakalah. Alwakalah ini dibenarkan oleh Islam sepanjang dipenuhi rukun dan syariatnya.

Dalam praktek surat kredit dengan prinsip Al-Wakalah ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan Bank Syariah, apabila nasabah mohon untuk dibuatkan surat kredit, maka bank akan membuatkan dan meminta nasabah menyediakan deposit sepenuhnya menurut harga barang yang akan di impor. Deposit itu dapat diterima dalam bentuk wadiah, bank hanya akan menggunakan komisi kepada nasabah di bawah elemen kontrak al ujr wa al-umlah.

3.1.2.Surat Kredit di bawah prinsip Al-Musyarakah.

Dalam perdagangan impor dan ekspor, para pelaku bisnis selalu menggunakan Surat Kredit (LC). Bank Syariah menawarkan kontrak perdagangan seperti ini kepada nasabah dibawah elemen kontrak Al-Musyawah.

Caranya adalah dalam pembayaran barang yang akan dibeli oleh nasabah, ia berkongsi dengan bank. Untuk penjualnya diserahkan kepada nasabah dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara pihak bank dan

nasabah menurut porsi yang disepakati bersama. Untuk keperluan ini nasabah tidak perlu di beratkan dengan reveler.

3.1.3.Surat Kredit dibawah Prinsip Al-Murabahah.

Bagi nasabah yang tidak memiliki modal yang cukup dapat menggunakan elemen kontrak Al-Murabahah dalam melaksanakan transaksinya. Kontrak ini akan memberikan peluang kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu barang dengan pembayaran secara bertangguh.

Dalam prakteknya, Bank Syariah dapat memberikan dan mengimpor barang sebagaimana yang dikehendaki oleh nasabah. Setelah barang itu dibeli oleh bank, nasabah akan memberinya dengan kontrak Al-Murabahah dan pembayarannya akan dilakukan oleh nasabah di kemudian hari.

Kontrak seperti ini oleh Bank Syariah diaplikasikan dalam berbagai produk pembiayaan perdagangan. Nasabah meminta bank menyediakan pembiayaan untuk keperluan putaran modal bagi pembelian suatu barang, barang-barang mentah atau alat ganti. Semua pembayaran akan dilakukan oleh bank, nasabah boleh membayarnya kepada bank dengan pembayaran ditangguhkan, setelah sampai masa jatuh temponya, nasabah akan membayar kepada bank sebagai harga yang telah disetujui.

Ad.3.2. Surat Jaminan.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap masyarakat muslim itu hendaklah membantu sesamanya. Oleh karena itu apabila seseorang

memerlukan orang lain untuk menjamin dirinya agar dapat dipercaya dalam memegang suatu amanah atau urusan, maka ia memerlukan penjamin atau disebut Al-Kafalah.

Jaminan artinya mau bertanggungjawab terhadap sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang lain secara hukum. Jaminan ini terbagi atas dua, yaitu :

Pertama, jaminan ke atas diri (kafalah bi a-nafs), seperti menjamin untuk dihadirkan orang yang tertuduh dihadapan Mahkamah; *kedua*, jaminan atas harta (al-kafalah bi al-dark), seperti penjaminan atas utang seseorang, keselamatan barang, penyerahan barang, pembayaran harga barang yang dijual, jenis inilah yang dipakai oleh Bank Syariah Muamalat.

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dapat mengeluarkan surat jaminan untuk mengusahakan sesuatu proyek dan melunasi pinjaman. Untuk itu bank boleh meminta nasabah meletakkan sejumlah uang deposit di bawah kontrak al-waidah. Keuntungan bank dengan menggunakan elemen kontrak seperti ini adalah mendapatkan bayaran dari nasabah berupa fee atau upah melalui kontrak ujr.

Ad.3.3.Pembiayaan Modal Kerja di bawah Kontrak murabahah.

Biasanya masyarakat kalau membuka suatu usaha atau aktivitas bisnis memerlukan modal. Bank Syariah bisa membiayai modal kerjanya dengan menggunakan kontrak Al-Murabahah. Contohnya sdr. E adalah dokter gigi. Ia ingin membuka tempat praktek, sehingga ia memerlukan modal. Bank dapat membantunya untuk mendapatkan tempat dan

peralatan yang ia perlukan, kemudian bank menjualnya kepada Sdr.E dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Produk Al-Murabahah yang dijual oleh Bank Syariah kepada nasabah, pada dasarnya tidak memerlukan kolateral atau agunan, sebab ia telah dicatat dan ditulis secara jelas, dan nasabah yang diberi fasilitas seperti ini bukanlah nasabah lain, melainkan nasabah yang sudah dapat dipercaya kredibilitasnya.

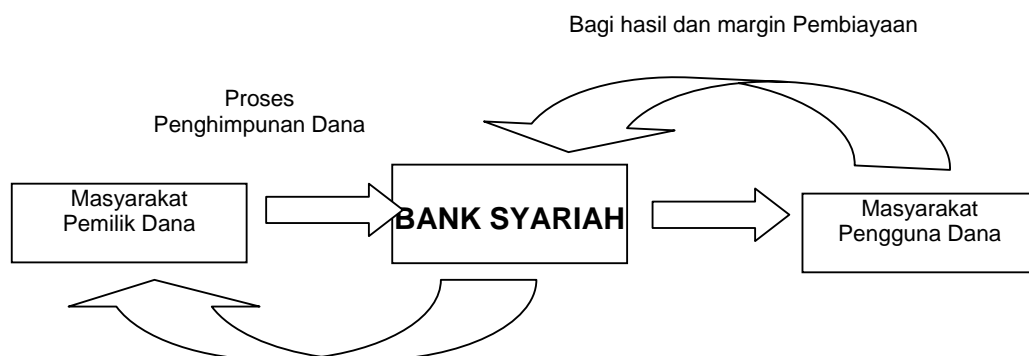
Ad.3.4.Pelayanan Lain.

Pada hakekatnya Bank Syariah dapat melayani berbagai keperluan yang diinginkan oleh masyarakat selagi ada unsur komersialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Umpamanya pelayanan pengiriman uang, pelayanan penukaran uang asing (jual beli valuta asing), pelayanan pembayaran telepon, listrik, air, jual beli reveler cheque, jasa penyewaan save keeping/deposit box dan lain-lain.

Pelayanan tersebut di atas beroperasi dalam elemen kontrak al-Ijarah. Bank hanya menggunakan upah atau service charge kepada nasabah karena hanya elemen inilah yang sesuai diterapkan.

Gambar 3

KONSEP DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

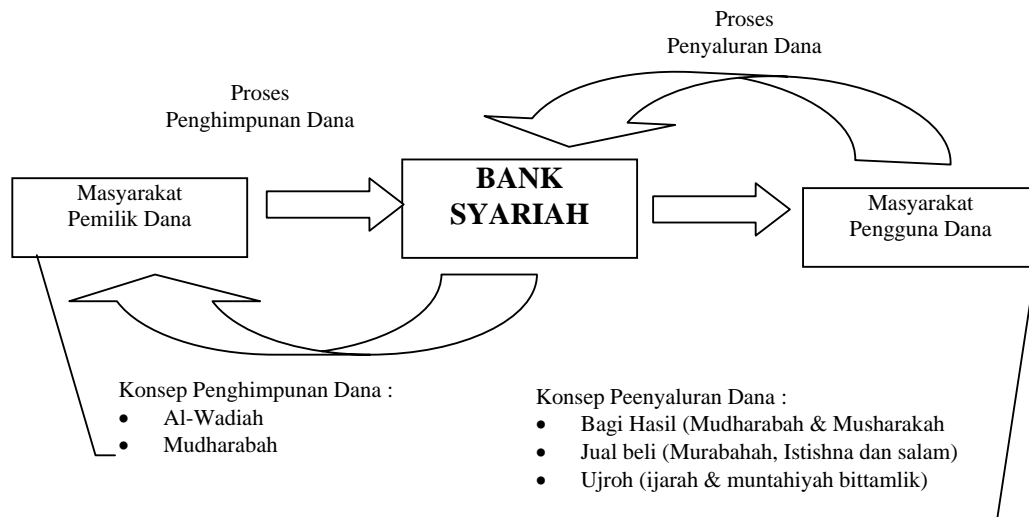




Gambar 3 diatas, menunjukkan bahwa dalam sistem perbankan Syariah di dalam proses penghimpunan dana maupun proses penyaluran dana berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank Syariah tidak akan menanggung beban yang begitu berat, disinilah tercermin asas keadilan.

Gambar 4

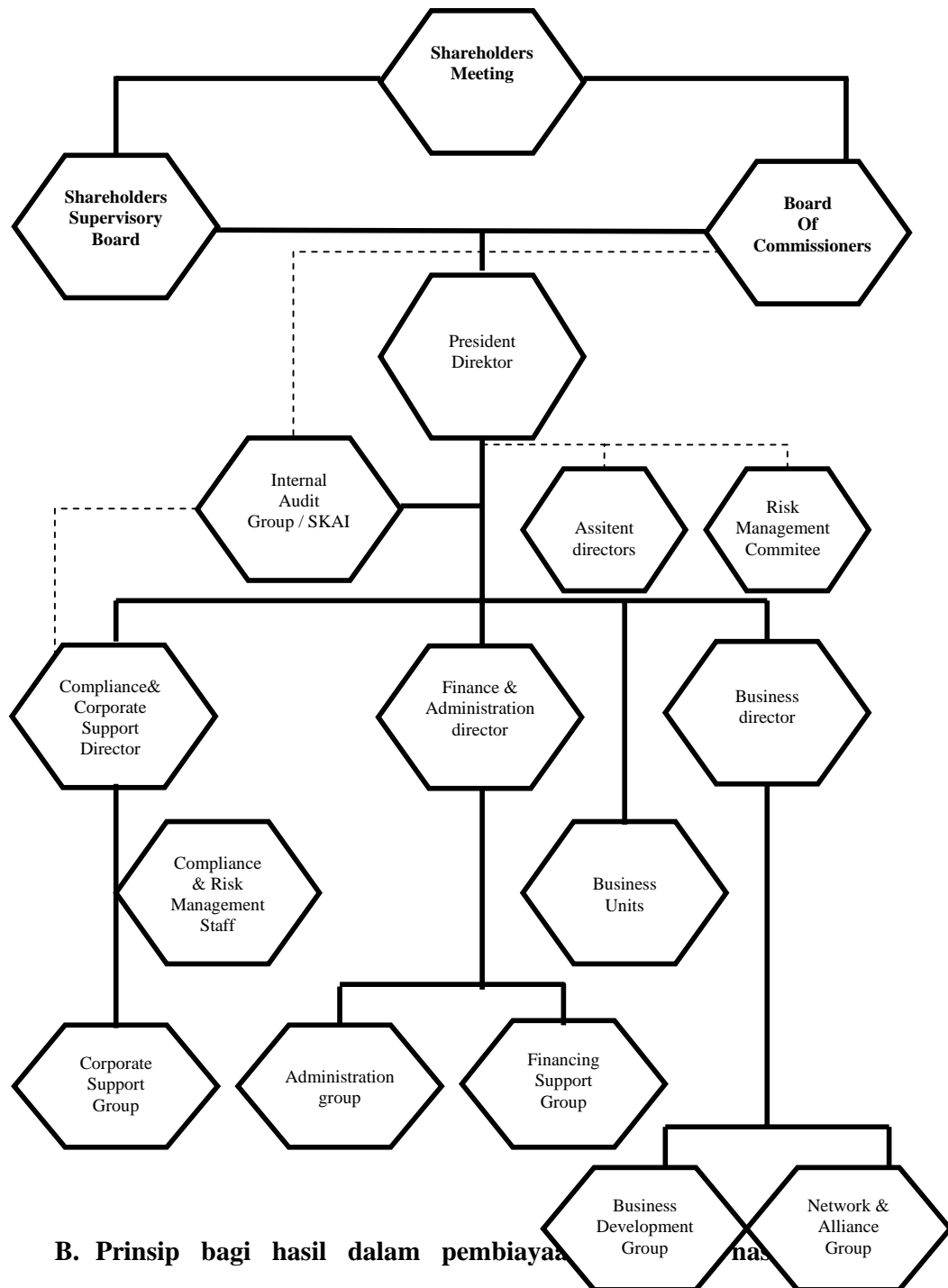
KONSEP PRODUK PERBANKAN SYARIAH



Gambar 4 tersebut diatas, bahwa produk Bank Syariah yaitu didalam proses penghimpunan dana mendasarkan pada prinsip Al-Wadiah dan Al-Mudharabah dan didalam proses penyaluran dana mendasarkan pada prinsip bagi hasil (Mudharabah & Musyarakah), jual beli (Murabahah) serta jasa-jasa.

GAMBAR 5

**STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE**



B. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan

Syariah.

Bank Syariah dalam melakukan usahanya menetapkan imbalan jasa yang diterima nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dikenal dengan istilah bank tanpa bunga. Bank Syariah dalam menerapkan bagi hasil menggunakan dua prinsip yaitu prinsip Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah.

1. Prinsip al-Mudharabah.

Mudharabah diartikan sebagai bentuk kemitraan (hubungan berserikat antara dua pihak, dimana di satu pihak akan menyediakan dana raja (shahibul maal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya satu proyek usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan membagi hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh perusahaan.

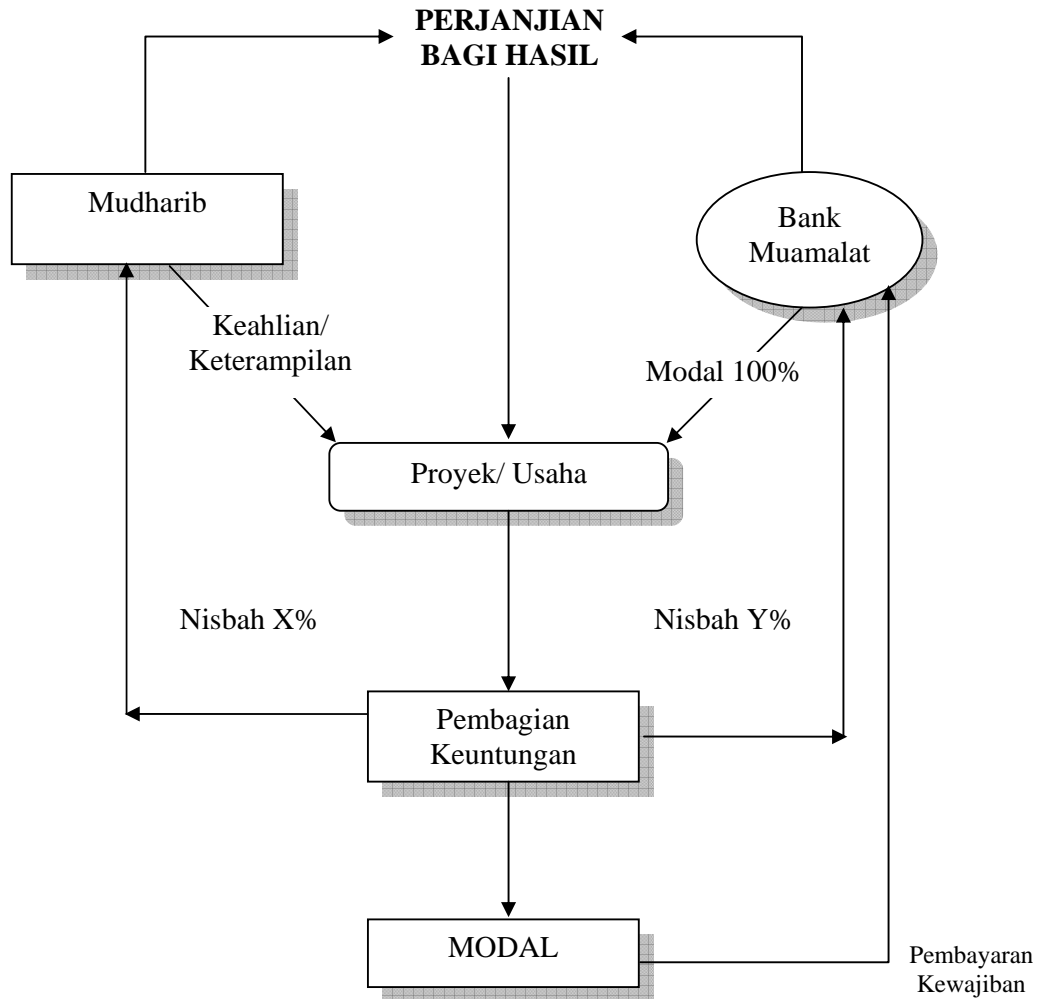
Rukun dan syarat Mudharabah :

- Rukun
 - a. Orang yang berakat :
 - Shahibul Maal / Rabbul Maal (pemilik modal)
 - Mudharib (pelaksana / usahawan)

- b. Modal (Maal)
- c. Kerja / usaha
- d. Ketentuan Nisbah bagi hasil
- e. Akad (ijab qabul)
- Syarat-syarat :
 - a. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum
 - b. Syarat modal yang digunakan harus :
 - Berbentuk uang dan / atau barang yang jumlahnya 100% dari sahibul maal.
 - Penyerahan uang dan atau barang dilaksanakan secara tunai / seketika langsung diserahkan kepada Mudharib.
 - c. Pembagian hasil usaha harus jelas, dan besarnya sesuai nisbah yang disepakati.

GAMBAR 6

SKEMA TEKNIS PERBANKAN PEMBIAYAAN MUDHARAKAH



Keterangan :

- Bank Muamalat bertindak sebagai Shahibul Maal (Penyedia Dana) dan nasabah sebagai Mudharib.
- Bagi hasil (keuntungan & Kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (nasabah = X% dan Bank = Y%).

Keberadaan Al-Mudharabah didasarkan pada :

(1) Al Quran Surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya : dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.

(2) Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi : Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan beliauapun memperkenankannya.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan :

Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhan (Mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

1.1. Pengertian Al-Mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷⁹

⁷⁹ Muhammad Rawas Qol'aji, dalam M. Syafii Antonio, Ibid, hal. 95.

Pengertian al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁸⁰

Mudharabah dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat) antara dua pihak, dimana disatu pihak akan menyediakan dananya saja (shahibulmal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian dalam melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam mengelola usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

⁸⁰ Ibid. hal 9

Pengertian Mudharabah dapat diartikan sebagai suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman jahiliyah atau sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dari investasi. Dalam Bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis ini : Qirodh, Muqarabah, Mudharabah⁸¹. Dari ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambali, tinggal di Irak, dan mereka menggunakan istilah Mudharabah, sebaliknya Imam Maliki dan Hanafi menggunakan istilah Mudharabah, sebaliknya Imam Maliki dan Hanafi menggunakan istilah Qiradh atau Muqaradah, mengikuti kebiasaan di Hijaz⁸².

1.2. Landasan Syariah.

Landasan dasar syariah Al-Mudharabah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadits, berikut ini :

a. Al Qur'an

(1). Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.

⁸¹ Sahalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, Fiqh ekonomi keuangan Islam (Jakarta : 2008) hal 168.

⁸² Muhammad Rofiq Dalam Hirsanudin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan (Yogyakarta : 2008) hal 13 lt. 14.

- (2). Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah (10) yang artinya "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT".

b. Hadist Rasulullah SAW

- (1). Hadits Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau memberi ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan memperkenankannya".
- (2). Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan "Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda :”tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharabah); (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual ;
- (HR. Ibnu Majah N0.2280, Kitab At-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zaelani'⁸³ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara Mudharabah.

1.3. Jenis-jenis Al-Mudharabah.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu Mudharabah, Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah.

Transaksi Mudharabah Muthlagah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.⁸⁴

b. Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah muqayyadah atau disebut istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlagah. Dalam hal ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Mahmoud al-Anshari, membedakan prinsip mudharabah ini dalam beberapa jenis, yaitu :⁸⁵

⁸³ Nasbu ar-Royah IV, dalam M. Syafii Antonio, ibid hal. 96.

⁸⁴ Ibid hal. 97

⁸⁵ Mahmud Al-Ansori, *Perbankan Islam*, terjemahan Maret 1993, hal 96

- a. Mudharabah Khusus, yaitu pemberian dana oleh seseorang sementara itu usaha mudharabah dilakukan oleh seseorang, sebagai individu atau badan hukum ;
- b. Mudharabah Berserikat, yaitu dalam hal ini bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk kemudian dipergunakan dalam bentuk mudharabah.
- c. Mudharabah mutlak, yaitu penerima dana (mudharib) memiliki kebebasan untuk menggunakan dana yang diterimanya, ada persyaratan-persyaratan tertentu dari pemilik dana, misalnya bentuk perdagangan atau usaha lainnya, waktu lainnya dan tempat pelaksanaan kegiatan, mudharib dalam hal ini menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya di samping mendapat keuntungan.
- d. Mudharabah bersyarat, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlak dimana pemilik dana menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh mudharib dalam pengelolaan dana yang diterimanya.

1.4. Manfaat dan resiko Al-Mudharabah

1. Manfaat Al-Mudharabah

- (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread ;

- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah ;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;
- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam Al-Mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (1). Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (2). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur ;

2. Prinsip Musyarakah.

Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi

penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakili dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut. Dalam hal terjadi kerugian maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

(1) Al-Qur'an Surat Al-Shad (38) ayat 24 yang artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.

(2) Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu”.
(HR. Abu Daud).

2.1. Pengertian Al-Musyarakah.

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸⁶

System musyarakah ini merupakan konsep dasar bank syariah. Dalam hal ini hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur

⁸⁶ Bidayatul Mutjahid II dalam M. Syafii Antonio, Ibid hal. 90

dan debitur sebagaimana halnya dalam praktek bank-bank konvensional.

2.2. Landasan Syariah.

Dasar hukum Musyarakah dapat dilihat dalam :

- (1). Al-Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.
- (2). Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu”. (HR.Abu Daud).
- (3). Ijma
Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni,⁸⁷ telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen.

2.3. Jenis-jenis Al-Musyarakah.

Pembiayaan bagi hasil secara musyarakah, ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi

⁸⁷ Abdullah Ibnu Qudama, Muqhni Wa Syark kabir, dalam M. Syafii Antonio Ibid hal. 91.

lainnya yang mengakibatkan pemilikan asset oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dari hasil asset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah, sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi :

(a). Syirkah Al-Inan.

Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama ;

(b). Syirkah Mufawadhah.

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan, suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

(c). Syirkah Amaal.

Syirkah Amaal jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

(d). Syirkah Wujuh.

Syirkah Wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau persentase baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada mempunyai yang disediakan oleh tiap mitra.⁸⁸

2.4. Manfaat dan resiko Al-Musyarakah.

Manfaat Al-Musyarakah

- (a). Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (b). Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
- (c). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d). Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;

⁸⁸ Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kosani dalam M. Syafii Antonio, Ibid hal. 93

- (e). Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam Al-Musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (a). Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

3. Prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional Bank Syariah.

Kegiatan operasional Bank Syariah menurut Pedoman Bank Indonesia, pada :⁸⁹

1. Prinsip Al Wadiah (Simpanan).

Al Wadiah merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

2. Prinsip Al-Mudharabah.

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat antara dua pihak, dimana di satu pihak akan menyediakan

⁸⁹ Dahlan Siamat *Manajemen Bank Bagi Hasil*, (Intermedia : Jakarta, 1995), hal. 124

dana saja / shahibul maal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib).

3. Prinsip Al-Musyarakah.

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau modal) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakili dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut.

4. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai'bitsaman'ajil

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran sekaligus atau tangguh) diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan system pembayaran tangguh.

5. Prinsip Al Ijarah dan Al Bai'Takjiri.

Prinsip Al Ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan persetujuan kedua pihak.

6. Prinsip Al Qardh Ul-Hasan

Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

7. Prinsip Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

8. Prinsip Al Hiwalah.

Prinsip ini adalah pengalihan hutang orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syariah.

9. Prinsip Al Rahn.⁹⁰

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan dalam syariah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

10. Prinsip Al Wakalah

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa.

11. Prinsip Sharf

Prinsip ini merupakan suatu lembaga perjanjian jual beli uang yang sejenis. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahan juga dilakukan pada waktu yang sama.

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (pustaka utama, Grafiti : Jakarta, 1999) hal 76

C. Penerapan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Nasabah Bank Syariah.

Dibidang penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Syariah memberikan jasa-jasa kegiatan pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Al-Mudharabah

Pembiayaan Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Syariah. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali apabila kerugian akibat dari kelalaian nasabah pengelola usaha.

Keberadaan perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah didasarkan pada:

(1). Al-Qur'an Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya :

"...Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.

(2). Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi

peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau pun memperkenalkannya.

Dalam hadist lain Rasulullah SAW menyatakan :

Dari Suhaid r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharabah); (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).

Pada perjanjian mudharabah (yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan usaha (untuk selanjutnya disebut mudharib) dengan PT. Bank Syariah sebagai pihak yang menyediakan dana (untuk selanjutnya disebut shahibul maal), bahwa mudharib dalam rangka menjalankan kegiatan dan memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal ini telah meminta Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (mudharabah) dan Bank Syariah menyetujui untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Mudharib sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Mudharabah. Sebagaimana dinyatakan oleh Mariam Darusbadruzaman.⁹¹

Bahwa perjanjian bagi hasil di terapkan antara bank dengan nasabah tanpa perhitungan bunga, perjanjian ini dalam system hukum perdata termasuk lingkup perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian bersama di luar KUH Perdata.

Kedua belah pihak (Bank Syariah Muamalat dan Mudharib) telah sepakat bahwa untuk maksud tersebut kedua belah pihak menandatangani

⁹¹ Mariam Darus badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian /Kontrak*, (elip, Jakarta, 1998) hal 28

dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil.

1.1. Syarat-syarat dan Ketentuan Bagi Hasil.

Syarat-syarat dari ketentuan bagi hasil sebagai berikut :

- a. Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara Bank Syariah dan Mudharib yang di bagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama yakni pendapatan dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya.
- b. Pendapatan yang dimaksud adalah bahwa Bank Syariah dan Mudharib setuju mengenai pembiayaan secara bagi hasil, bahwa pendapatan yang didapat dari usaha Mudharib tersebut akan dibagi dengan nisbah 25% untuk Bank Syariah dan 75% untuk Mudharib sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos. Pendapatan yang dibagi tersebut dapat dihitung sebagai pengembalian pembiayaan pokok dan pendapatan Bank Syariah yang telah tercantum dalam daftar pembayaran. Namun apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini terjadi fluktuasi atau perubahan yang mengakibatkan pada akhir masa perjanjian, Mudharib mengalami kerugian, sehingga proyeksi keuntungan sebagaimana telah ditetapkan (25% Bank Syariah Muamalat dan 75% untuk Mudharib) di atas menjadi tidak terpenuhi bagi salah satu pihak, maka pembagian pendapatan yang telah diperhitungkan / diterima Bank Syariah akan dihitung kembali

pada setiap kuartal setelah diterimanya laporan akuntan publik yang disebut pada setiap bulan.

Dalam hal tidak ada pendapatan atau bahkan merugi, maka penutupan kerugian tersebut diambil dari jumlah pokok pembiayaan yang di atur sebagai berikut sebagaimana tersebut dibawah ini.

c. Dalam hal terjadi kerugian :⁹²

Bank Syariah hanya menanggung kerugian yang timbul disebabkan hal-hal di luar batas kemampuan Mudharib (Force Majeure). Dengan tidak mengurangi dalam ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata :

Pasal 1244 KUH Perdata :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada ikatan buruk padanya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang terlarang olehnya.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada mudharib untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada Shahibul Maal (Bank Syariah), oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Ada tiga hal yang

⁹² Nur Aini Al-Haki, wawancara, sekretaris Bank Syariah Muamalat Semarang, tanggal 11 Maret 2008.

menyebabkan Mudharib untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yaitu :

- a). Perang, pengambil – alihan (baik yang diumumkan atau tidak), pendudukan, tindakan negara atas musuh, kerusuhan masal dan sabotase;
- b). Bencana alam, termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, halilintar, pergerakan tanah, dan keadaan cuaca yang sangat buruk.
- c). Pemogokan buruh yang menyebabkan terganggunya usaha yang timbul bukan karena kesalahan Mudharib atau kontraktornya atau sub kontraktornya.

Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana tersebut di atas, maka Bank Syariah akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya secara tertulis kepada Mudharib yang berisi laporan keuangan dari konsultan yang telah diaudit oleh akuntan publik, pernyataan dari pengurus perusahaan-perusahaan secara tertulis yang disampaikan oleh Bank Syariah mengenai kerugian tersebut dan dokumen-dokumen yang sah yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Muamalat. Bank Syariah hanya akan menanggung kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan pada Mudharib.

Menurut para ahli fiqih pengikut Hanafi dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus

ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat.⁹³

Dengan tidak mengurangi kebutuhan dalam perjanjian Bank Syariah Muamalat baru berkewajiban memberikan pembiayaan kepada Mudharib, jika telah dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut :⁹⁴

- a). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penggunaan pembiayaan, Bank Syariah Muamalat telah menerima sebuah dokumen yang diuraikan dalam lampiran yang di tunjukkan (dilampirkan) pada minit akte perjanjian (semua dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank Syariah Muamalat).
- b). Telah dibuat perjanjian dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya baik asli atau salinan resminya telah diserahkan kepada Bank Syariah Muamalat, yaitu :
 - Pemberian jaminan pribadi (termasuk jaminan dari para pemegang sahamnya atau lainnya).
 - Pemberian jaminan Mudharib (termasuk jaminan dari afiliasinya);
 - Fidusia atas barang-barang bergerak milik Mudharib;
 - Hak tanggungan atas tanah-tanah Mudharib;
 - Cessie atas piutang-piutang Mudharib.
- c). Surat pernyataan dan kesanggupan telah dibuat dan ditandatangani dengan sebagaimana mestinya dan asli atau salinan resminya telah diserahkan kepada Bank Syariah Muamalat.
- d). Bank Syariah Muamalat telah menerima dokumen, pernyataan, pendapat dari segi hukum atau akta lain yang secara wajar diminta oleh Bank Syariah Muamalat.

⁹³ M. Nejatunlah Siddiqi, terjemah, *Fahriyah, Kemitraan Usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*, Yogyakarta, 1996, hal. 19

⁹⁴ Nur Aini Al-Haqi, wawancara, *sekretaris Bank Syariah Muamalat Semarang*, tanggal 12 Maret 2008.

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka mudharib harus menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

a) Status Mudharib :

Mudharib adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri secara sah dan tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

b) Keberadaan Mudharib, pada saat di tandatanganinya perjanjian, Mudharib adalah tidak dalam keadaan dibubarkan atau dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 KUHD, bahwa :

Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perorangan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara.

c) Kuasa dan Kewenangan.

Direksi Mudharib adalah kuasa dan kewenangan untuk menandatangani melaksanakan perjanjian pembiayaan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian pembiayaan. Direksi Mudharib telah mengambil segala tindakan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Mudharib atau aturan lainnya yang memberikan, menerbitkan dan menjalankan perjanjian pembiayaan, surat sanggup dan perjanjian lainnya.

d) Perjanjian mengikat.

Perjanjian pembiayaan termasuk berikut perubahan-perubahannya, penambahan atau pengurangan ataupun dokumen-dokumen yang terpisah maupun yang tidak dari perjanjian pembiayaan berlaku dan mengikat Mudharib.

e) Peraturan-peraturan yang berlaku, penandatanganan, penyampaian penerbitan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan surat sanggup tidak atau tindakan menyimpang dari setiap ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Anggaran Dasar Mudharib atau perjanjian atau dokumen-dokumen atau perjanjian lain yang mengikat Mudharib atau mengikat aset Mudharib.

f) Persetujuan

semua persetujuan, lisensi atau perjanjian dari pihak yang berwenang yang dimintakan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk ditandatangani, menyampaikan, menerbitkan, melaksanakan untuk sah dan berlakunya perjanjian pembiayaan adalah telah diperoleh oleh Mudharib.

g) Ligitasi.

Tidak terdapat proses ligitasi, arbitrase atau administrasi terhadap Mudharib oleh pihak yang berwajib atau oleh pengadilan saat ini atau yang sedang ditunda

mempengaruhi asset, usaha dan keadaan keuangan Mudharib.

h) Perijinan.

Mudharib memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya.

i) Keterangan Mudharib.

Keterangan mengenai akta pendirian Mudharib, anggaran dasar, direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham sebagaimana yang digambarkan dalam lembar keterangan Mudharib adalah benar dan tepat.

j) Penandatanganan perjanjian adalah orang-orang yang bertindak dari atas nama Mudharib serta mendapat kuasa dari Mudharib adalah sah dan berwenang.

k) Perubahan anggaran dasar dan pengurus Mudharib, mudharib tidak boleh merubah anggaran dasarnya dan pengurusnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank Syariah Muamalat.

l) Bank Syariah Muamalat berhak memasuki kantor dan pabrik atau tempat lainnya untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, transaksi. Mudharib yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

m) Aktiva yang tercantum dalam neraca mudharib itu bebas dari silang sengketa dengan pihak ketiga.

- n) Tidak akan terjadi klaim (tuntutan) baik dari pihak lain selain yang tercantum dalam neraca tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terjadi tuntutan seperti itu, maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab pribadi-pribadi mudharib untuk menyelesaikannya, tetapi tidak terbatas pada utang-utang pajak yang terjadi sebelum perubahan pembiayaan ditandatangani.
- o) Kegiatan perusahaan akan tetap dijalankan sesuai dengan anggaran dasar berikut perubahan-perubahan, walaupun perubahan Anggaran Dasar Perseroan, karena adanya kerjasama yang belum disetujui oleh pihak yang berwenang.

Syarat pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah) yang menjadi pertimbangan bagi operasionalisasi Bank Syariah Muamalat dalam memberikan pembiayaan Mudharabah adalah :⁹⁵

- a. *Modal Mudharabah harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai ijab qabul, sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati.*
- b. *Persentase pembagian keuntungan yang ditentukan hanya untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah.*
- c. *Dasar bagi pembiayaan Mudharabah ialah modal berasal dari pihak pemodal (Bank Syariah Muamalat) sedang kerja dilakukan pihak perusahaan. Oleh karena itu adalah tidak sah apabila penetapan kerja dilakukan oleh pihak pemodal.*

⁹⁵ Nur Aini Al-Haqi, wawancara, sekretaris Bank Syariah Muamalat Semarang, tanggal 13 Maret 2008.

- d. *Bila pembiayaan mudharabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, pihak pengusaha menanggung kerugian karena tidak mendapatkan manfaat dari jerih payahnya. Jika usaha tersebut hanya kembali modal, maka modal tersebut sepenuhnya untuk pihak pemodal, sedangkan pihak pengusaha tidak mendapatkan bagian.*
- e. *Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai oleh pihak pengusaha.*
- f. *Proyek atau usaha yang dilakukan haruslah usaha halal.*
- g. *Kedua belah pihak yang akan mengadakan mudharabah haruslah cakap dan sah secara hukum untuk melakukan perikatan.*
- h. *Pengusaha tidak boleh mencampurkan harta Mudharabah dengan harta lain atau harta milik pribadi kecuali hal seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan setempat.*
- i. *Apabila pengusaha hendak menjalankan Mudharabah dengan pihak ketiga, di mana pengusaha di sini berperan sebagai pemilik modal pada akad dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik modal dengan syarat pengeluaran tersebut berada dalam batas kewajaran.*
- j. *Apabila pihak pengusaha dalam menjalankan proyek melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak pengusaha bertanggung jawab terhadap semua risiko kerugian dari proyek atau usaha yang tengah dijalankannya dan wajib membayar sepenuhnya modal yang telah diberikan oleh pihak pemodal.*
- k. *Perjanjian Mudharabah selesai dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.*
- l. *Pihak pemodal karena sesuatu hal yang membahayakan berhak memecat pengusaha dengan diberikan peringatan terlebih dahulu.*
- m. *Apabila terjadi aksi pembatalan Mudharabah maka semua modal dan untung adalah menjadi hak pemodal dan pengusaha berhak menuntut upah yang setimpal dengan perhitungan yang telah dijalankannya.*
- n. *Apabila terjadi suatu kerusakan atau kerugian dalam Mudharabah, maka penggantian kerusakan tersebut haruslah diambil dari keuntungan bila ada, kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal. Pihak pengusaha tidak diwajibkan mengganti kerusakan atau kerugian ini kecuali hal tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.*

- o. Perjanjian Mudharabah berakhir dengan matinya salah satu pihak.*
- p. Pemindahan hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat/ lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan.*
- q. Peminjaman perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan tentang usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur kejujuran dapat dibaca oleh pihak bank.*
- r. Peminjam dalam mencicil pinjaman dan bagi hasil harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.*

1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah.

Tidak seperti halnya yang dilakukan bank-bank konvensional umumnya dalam memberikan kredit, pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah dilakukan dengan menjembatani kepentingan masing-masing pihak terutama debitur yang seringkali dirugikan dalam perjanjian kredit di bank-bank konvensional yang umumnya menerapkan perjanjian standar perjanjian pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang sering kali melanda usaha Mudharib.

Pembiayaan Mudharabah lebih diprioritaskan pada pengusaha kecil dan menengah. Biasanya hambatan yang paling besar bagi pengusaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal, minimnya penguasaan teknologi dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Melalui pola pembiayaan Mudharabah ini, hambatan-hambatan tersebut diusahakan dapat dikurangi bahkan mungkin dapat

dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu dalam pembiayaan Mudharabah, pihak-pihak yang terlibat adalah :

1. Bank Syariah sebagai pihak penyedia dana (shahibul Maal) yang menyediakan pembiayaan.
2. Pengusaha atau para pengelola (Mudharib) yaitu orang-orang yang menerima pembiayaan. Mudharib dapat berupa perorangan dan kelompok orang. Mudharib perorangan bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang diterimanya, sedangkan mudharib kelompok orang tanggungjawabnya dilakukan secara tanggung renteng artinya semua mudharib mempunyai tanggungjawab yang sama. Salah satu dapat membebaskan perutangan secara keseluruhan.
3. Pihak terafiliasi, yaitu pihak yang memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai. (Pasal 1 butir 15 huruf c UU No.7 tahun 1992)

Peran pihak terafiliasi (konsultan) yang keberadaannya disebutkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah, adalah membantu mudharib dalam mengelola usahanya secara lebih baik dan ahli teknologi. Sehingga diharapkan tingkat produksi akan meningkat tanpa mengesampingkan aspek analisis dan evaluasi secara Perbankan. Adanya penyebutan pihak terafiliasi dalam perjanjian Mudharabah karena antara Bank Syariah dengan konsultan telah terjadi perjanjian kerja sama sebelumnya, sedangkan bagi mudharib, keberadaan konsultan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah

adalah sangat menguntungkan karena mudharib dapat belajar untuk mengelola usahanya secara professional dengan mendapat bimbingan orang ahli dan menguasai di bidang usaha yang ditekuni mudharib.

1.3. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah.

Berakhirnya perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah dalam praktek Bank Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Mudharib telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya.
2. Bank (Shahibul Maal) membatalkan perjanjian Mudharabah karena Mudharib terbukti melakukan wanprestansi yang diikuti dengan adanya tuntutan dari bank terhadap pembiayaan mudharabah yang telah diterima dari bank (Shahibul Maal).
3. Objek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan mudharib atau disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure), seperti objek pembiayaannya musnah karena bencana alam.
4. Proyek usaha Mudharib yang dibiayai oleh bank (Shahibul Maal) mengalami kerugian total (total loss), sehingga mudharib tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaannya kepada bank (shahibul Maal). Hal ini terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), seperti proyek usaha mudharib tertimpa bencana alam.

5. Bank (Shahibul Maal) mengakhiri pembiayaan apabila usaha mudharib terus-menerus mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan, produk yang dihasilkan mudharib tidak marketable dan sulit untuk dikembangkan untuk produk lain, adanya deregulasi atau peraturan pemerintah yang menghambat pemasaran dari usaha mudharib atau menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

1.4. Manfaat pembiayaan Al-Mudharabah.

- (a). Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- (b). Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
- (c). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d). Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu akan dibagikan;

- (e). Prinsip bagi hasil mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam Al-Mudharabah terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (a). Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur;

2. Pembiayaan Al-Musyarakah.

Pembiayaan Al-Musyarakah yaitu satu perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah, di mana Bank Syariah menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh mitra usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank Syariah dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

(1). Al-Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 artinya :

“.....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh....”

(2). Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

“.....Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu...” (HR.Abu Daud).

Dalam perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah (yang selanjutnya disebut perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Bank Syariah dan nasabah (Mudharib), bahwa mereka masing-masing telah setuju untuk membuat perjanjian pembiayaan musyarakah dengan memakai syarat dan ketentuan bagi hasil.

2.1. Syarat dan Ketentuan bagi hasil, sebagai berikut :

1. Bank Syariah bersepakat kepada mudharib bahwa bank akan :

(a). Menyediakan seluruh pembiayaan modal asset dan pembiayaan modal kerja berdasarkan perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah ke rekening giro mudharib pada tanggal pencairan.

(b). Setiap hal yang berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan yang menyangkut proyek akan dikonsultasikan kepada nasabah pada setiap kondisi yang dibutuhkan, agar jaminan penerapan dari perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah adalah benar, tetapi tidak ada

keharusan bagi Bank Syariah Muamalat untuk bermusyawarah bagi sesuatu yang menyangkut hak bank.

2. Kompensasi bagi Mudharib, adalah :

(a). Mudharib akan menyediakan pelayanan teknis manajemen dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran khususnya dalam perubahan partisipasi pembagian pendapatan dan diberikan hak kepadanya selain yang berkaitan pada pelayanan manajemen atau jumlah pengeluaran yang telah disebutkan.

(b). Mudharib akan menyediakan jasa operasi dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran, khususnya dalam perubahan kompensasi yang tertera pada lampiran sebagai pengeluaran proyek dan diberikan hak kepadanya selain jumlah yang berkaitan dengan pelayanan jasa operasi atau pengeluaran yang telah disebutkan.

3. Partisipasi masing-masing pihak (Bank Syariah dan Mudharib dalam pembagian pendapatan) adalah :

(a). Pendapatan yang didapat dibagi yang diridhlohi Allah SWT jika ada pertama kali akan dialokasikan secara kuwartalan, ketika pendapatan yang dapat dibagi positif sebagaimana tertera pada buku proyek (alokasi untuk pembiayaan modal kerja 65% dan alokasi untuk pembiayaan modal asset 35%).

- (b). Selanjutnya alokasi pembiayaan modal kerja dan modal aset akan dikredit pada akhir kwartal secara terpisah ke rekening Mudharib dan rekening bank dalam proporsi seperti kontribusi yang dijanjikan pada masing-masing pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal aset sebagaimana yang disepakati.
4. Partisipasi kerugian, jika ada, akan dipikul oleh Mudharib dan Bank Syariah dengan perbandingan jumlah yang sebanding dengan kontribusi untuk setiap pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal aset yang telah ditetapkan tersebut di atas yang berakibat pembagian pendapatan dari proyek akan menjadi tidak cukup.

Sebagai pengaman terhadap kewajiban Mudharib untuk membayar dan untuk melaksanakan pembayaran pada saat tanggal pencairan Mudharib akan menyimpan dana sebagai jaminan rekening deposito. Pendapatan dari jaminan deposito akan ditransfer dari rekening kepada Mudharib sebagai pendapatan. Bank Syariah akan mentransfer dari besarnya deposito, jumlah yang tersedia akan dibutuhkan untuk membayar kewajiban Mudharib pada saat jatuh tempo.

Sebagai jaminan atas tanggungjawab dan performan dari seluruh tanggungjawab Mudharib yang tertera, maka Mudharib harus melengkapi dengan jaminan tambahan kepada Bank garansi dan bank tidak berkewajiban untuk melengkapi

setiap dan sebagaimana yang tertera pada perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah sampai dokumentasinya dilengkapi dan bahan-bahan yang memuaskan bank yang telah diserahkan sebagai akibat dari transaksi.

Sebagaimana tersirat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

2.2. Manfaat dan resiko pembiayaan secara Musyarakah diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a). Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (b). Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- (c). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (d). Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan.

(e). Prinsip bagi hasil Mudharabah maupun Musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam Al-Musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (a). Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak.
- (b). Lalai dari kesalahan yang disengaja.
- (c). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah itu bila nasabahnya tidak jujur.

Dari kedua bentuk pembiayaan diatas (perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah dan perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah) dalam klausulnya ditentukan bahwa perjanjian ini akan diatur dan tunduk pada hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.

D. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Hambatan Penerapan Prinsip Bagi Hasil.

Memperhatikan laju ekspansi di Bank Syariah dalam tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan kelangsungan dan kelayakan system operasi tanpa berdasarkan bunga. Hal ini tentu mengejutkan siapa saja

yang percaya bahwa bank dan system keuangan tidak akan dapat beroperasi dalam suatu ekonomi modern tanpa bergantung pada mekanisme tingkat bunga. Pengalaman selama enam tahun Bank Syariah beroperasi melalui empat sistem produk pembiayaan yaitu, bagi hasil atas kontrak Mudharabah dan kontrak Musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli (al- bai), hasil sewa atas kontrak Ijarah dan Ijarah Wa Iqtina dan Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa Syariah lain. Bank Syariah dibidang penyaluran dana kepada masyarakat mengintensifkan dua bidang yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah. Hal ini ternyata menimbulkan persepsi dari masyarakat menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam Bank Syariah dengan bunga pada perbankan konvensional. Akibatnya masyarakat masih meragukan kemurnian Bank Syariah sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih pada Bank Syariah. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank dan Perbankan Syariah pada umumnya. Hambatan yang lain adalah:

(a). Masalah sumber daya manusia insani.

Dikotomi dalam system pendidikan syariah dan pendidikan umum menyebabkan adanya dualisme intelektual diantaranya para ulama dengan sarjana-sarjana muslim, sementara produk-produk perbankan syariah khususnya Bank Syariah harus diciptakan oleh kedua disiplin tersebut secara bersama-sama. Di samping itu masyarakat muslim Indonesia pada umumnya belum

terpikir dengan praktek perbankan syariah. Oleh karena itu mereka pun memandang perbankan syariah (dengan menggunakan persepsi konvensional, selain itu ada pula sebagai lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi atau bisnis).

Langkanya sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank Syariah. Kendala sumber daya manusia dalam perkembangan perbankan syariah disebabkan oleh karena sistem perbankan ini belum lama dikembangkan. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dari sisi bank pelaksana maupun dari Bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang.

(b). Standar Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi. Transaksi serta piranti-piranti yang digunakan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini juga melakukan audit kesyariahan terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun demikian dalam prakteknya ternyata keseragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah. Hal ini disebabkan setiap Dewan Pengawas Syariah di setiap

institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Kondisi yang demikian ini yang dapat membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

Usaha penyelesaian hambatan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang handal dan professional, suatu bank termasuk perbankan syariah dapat melakukan usaha/ kegiatan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
- (b) Supaya bank Syariah produknya sesuai dengan standar Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebab kalau tidak berarti tidak sesuai dengan produk yang sesuai dengan Standar Fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip bagi hasil pada Bank Syariah terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah Bank Syariah yang didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersama antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Konsep Bank Syariah berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha.

Bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian.

2. Penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah menimbulkan dampak antara lain dalam hal terjadi kerugian dari nasabah, maka asset yang dimiliki oleh nasabah dijadikan jaminan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah terhadap nasabah. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi, konsep bank syariah. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh Bank Syariah (cabang Semarang) dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jika dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pembiayaan ini memiliki

persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah dari segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausul-klausul. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (mudharib).

3. Hambatan yang dihadapi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah belum adanya Sumber Daya Manusia Insani yang menguasai mengenai perbankan syariah, sehingga nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah, apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana masih mendasarkan pada peraturan bank konvensional.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Bank Syariah Muamalat dengan sistem syariat yang menerapkan perjanjian pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil dan juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
2. Perlu diperhatikan pengembangan SDM yang memahami Bank Syariah secara keseluruhan dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan, sehingga dapat mengembangkan produk-produk dari Bank Syariah Muamalat yang mudah dipahami masyarakat.
3. Membuka jaringan kantor cabang Bank Syariah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Bank Syariah sebagai alternatif diantara sistem-sistem yang berlaku saat ini di masyarakat.

4. Meningkatkan jumlah modal dengan menjalin kerjasama dengan Bank Syariah lain baik di dalam dan di luar negeri, karena dengan modal yang ada sekarang akan sulit bagi Bank Syariah untuk berkembang dan mengadakan ekspansi usahanya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus, Bustanuddin, 1999, *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, Studi Perbandingan Antara Pandangan Ilmiah dengan Ajaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Alvabeta, Bandung.
- An-Nahbani Tagyuddin, 1996 M/An Nidlam, Al Iqtishadi Fil Islam diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risliah Gusti, Surabaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- , 1420 H/1999 M, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Adi Bastian Salam, *Kedudukan Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, 2000, Bengkulu) hal. 18.
- Asikin Zaenal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, ("Radja Grafindo, Jakarta, 1995) hal.4.
- Al Anshari, Mahmoud, 1993, *Perbankan Islam*, terjemahan Minaret, Jakarta.
- Almath, Muhammad Faiz, 1998, *1100 Hadist Terpilih*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Al vabet, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Al Vabeth, Jakarta.
- Ashshiddiqi, T.M.Hasbi, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

- Cecep K Halim, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal.3.
- Chapra, M. Umar dan Khan, Tariqullah, *Regulasi dan pengawasan bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Bagi Hasil*, (Intermedia : Jakarta, 1995), hal.124.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1998, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian/Kontrak*, Jakarta.
- Daud Ali, Muhammad, 1998, *Hukum Islam*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hallaq, B. Idael, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Pengantar untuk Usul Figh Mazhab Suni, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kara, Muslimin. H, 2005, *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta.
- M. Amim Azis, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Banki, Jakarta
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, (Jakarta, 1999), hal.95-96.
- Mahmoud al Anshari, *Perbankan Islam*, terjemahan Minaret 1993, hal.96.
- Manan, Abdul, 1997, *Islamic, Economic, Theory dan Practics*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin, dkk, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

- Masyhuri, A. Azis. 1997, *Masalah Keagamaan Mukhtamar dan Munas Nahdatul Ulama*, Surabaya.
- Masyhur, Kahar, 1999, *Beberapa Pendapat Tentang Riba, Kalam Mulia*, Jakarta.
- Muhaimin, *Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya di Indonesia*, Tesis UNDIP, 2001, hal.8.
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Press, Yogyakarta.
- Muhammad, 2000, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Tes*, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005 *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPY KPN*, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 1-86.
- Muhammad Rawas Qol Aji, dalam M. Syafii Antonio
- Muhammad Rofiq, dalam Hirsanudin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta : 2001, hal. 9-160.
- Muslehuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Islam*, judul asli Banking and Islamic Law, Penerjemah Aswin Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasbu Ar-Rayah IV, dalam M. Syafii Antonio.
- , 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Peter, A.AG, Koesriani Siswosuebrotto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Perwataatmadjua, Kernaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Qaardawi, Yusuf, Fawa' ai Al Bunuk : Hiya Ar-Riba Al-Haram, diterjemahkan oleh daud Rasyid, *Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) tentang "Bunga Bank"* berdasarkan Al Qur'an, Sunnah.

- Rasjidi, Lili, IB Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung.
- Saed Abdullah, 2004, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta
- Sahalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, 2008, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan Budi Utomo, *Jawaban Tuntas Masalah Bunga*, Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga, No. 10 Tahun III, 2001, hal.37.
- Siddiqi, M. Nejatullah, penerjemah, Fakhriyah Mumutihani, 1997, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung, Semarang.
- Sudarsono Heri, 2003, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisya-FE UII, Yogyakarta
- Sudewo, Eri, 1999, *Ekonomi Bebas Bunga*, Pedoman Akuntansi Syariah, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil, Bandung.
- Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, hal 14-15.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah* (Seminar Nasional, UNISBA, Bandung, 2000), hal.10.

-----, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Utama, Grafiti : Jakarta, 1999). hal.76.

B. MAKALAH/ JURNAL PENELITIAN/ MAJALAH/ TESIS/ DISERTASI

Arifin, Zainul, 2000, *Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.

Baraba, Achmad, 1999, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.2, No.3 Desember 1999.

Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta.

Djamil, Fathurrahman, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum bisnis.

Himpunan *Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan 3, Yogyakarta.

Info Bank No. 124, April 1990,

Info Bank No. 319, Oktober 2005,

Info Bank No. 343, Oktober 2007,

Info Bank No. 334, November 2007,

Joyosumantoro, Soebardjo, 2000, Majalah Saksi No. 20 Tahun II Tanggal 31 – 13 Juni.

Karim, Adiwarmanto, 2000, *Peluang dan Kendala Pasar Keuangan Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Karim, Adiwarmanto, 2008, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke 3, Jakarta.

Khalifah, Edisi 2, Tahun I, 19 Juli-16 Agustus 2008.

Kelib, Abdullah, 1998, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadya Semarang*, Penelitian, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, Edisi III, Oktober.

Kelib, Abdullah, 1995, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekunder*, masalah-masalah hukum, majalah FH Undip No. 5

Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, 1990, *Sejarah Dan Perkembangan Metode Perbankan Di Indonesia*, Jakarta.

M. Nejatullah Siddiqi, 1996, *Terjemahan Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Prajoto dan Associates, 2006, *Kajian Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Desember, Makalah Tidak Diterbitkan.

Sahril Sabirin, 2007, *Sambutan Gubernur Bi Dalam Muhammad Safii Antonio, Bank Syariah*, Wacana Ulama dan Cendekiawan. November.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Rahasia Bank Berbagai Masalah dan Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.8, Jakarta.

Sri Imaniyati, Neni, 1997, *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis, UNDIP.

Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 6, No. 6, Mei 2008.

Suyono, 2000, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Tazkia Institute, 1999, *Riba dan Permasalahannya*, Jakarta

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip bagi hasil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999.

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah